

**PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM
PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN
BONE-BOLANGO DI TENGAH PANDEMI COVID 19**

(Studi Masyarakat Pemilih di Kecamatan Bulango Selatan)

Oleh

ISKANDAR N. YANTU

S2117032

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Di Universitas
Ichsan Gorontalo



**PROGRAM SARJANA
ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
GORONTALO
2021**

HALAMAN PENGESAHAN

PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO DI TENGAH PANDEMI COVID 19

(Studi kasus : Masyarakat Pemilih di Kecamatan Bulango Selatan)

Oleh

ISKANDAR N. YANTU

S2117032

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar sarjana
dan telah disetujui oleh tim pembimbing.

Gorontalo, 2021

PEMBIMBING I

Dr. Arman, S.Sos.,M.Si
NIDN : 0913078602

PEMBIMBING II

Swastiani Dunggio, S.IP.,M.Si
NIDN : 0930048307

Mengetahui

Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Darmawaty Abdul Razak, S.IP.,M.AP
NIDN : 0924076701

HALAMAN PERSETUJUAN

PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM
PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN BONE
BOLANGO DI TENGAH PANDEMI COVID 19

(Studi kasus : Masyarakat Pemilih di Kecamatan Bulango Selatan)

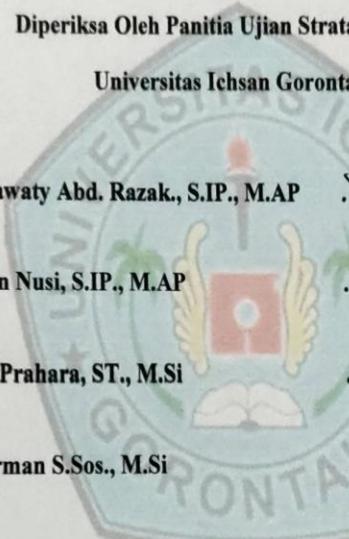
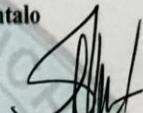
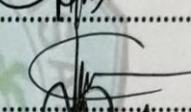
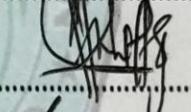
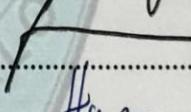
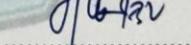
Oleh

ISKANDAR N. YANTU

S2117032

Diperiksa Oleh Panitia Ujian Strata Satu (S1)

Universitas Ichsan Gorontalo

- 
1. Darmawaty Abd. Razak., S.IP., M.AP 
 2. Marten Nusi, S.IP., M.AP 
 3. Sandi Prahara, ST., M.Si 
 4. Dr. Arman S.Sos., M.Si 
 5. Swastiani Dunggio, S.IP., M.Si 

Mengetahui:

Dekan
Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik

Dr. Arman, S.Sos.,M.Si
NIDN. 0913078602

Ketua Program Studi
Ilmu Pemerintahan

Darmawaty Abdul Razak, S.IP.,M.AP
NIDN. 0924076701

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Iskandar N. Yantu

NIM : S2117032

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi yang berjudul **“Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bone Bolango Ditengah Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Masyarakat Pemilih Di Kecamatan Bolango Selatan)”** adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo, maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan Penulisan sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan, saran pembimbing, dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi.

Demikian Surat Penyataan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 04 Juni 2021



ISKANDAR N. YANTU

ABSTRACT

ISKANDAR N. YANTU. S2117032. THE COMMUNITY POLITICAL PARTICIPATION IN THE BONE BOLANGO REGIONAL ELECTION AMIDST THE COVID-19 PANDEMIC (A STUDY ON VOTERS COMMUNITY IN SOUTH BULANGO SUBDISTRICT)

This study aims to examine the voting behavior of the South Bulango sub-district community and the role of supporting factors in the increase of community political participation in the Bone Bolango regional election amidst the COVID-19 pandemic. The method applied in this study is a descriptive qualitative approach where the informants being the mandatory voters aged 17 years and over. The number of informants is adjusted to the data needed either primary or secondary data comprising of Human Resources Commissioner of Bone Bolango General Election Commission (KPU Bone Bolango) and the community of South Bulango sub-district. The technique of data collection uses observation, interviews, and documentation. The data analysis consists of three parts which are data reduction, data display, and conclusion drawing. The results of the study indicate that the community political participation in the Bone Bolango regional election amidst the COVID-19 pandemic in the South Bulango sub-district can be classified as good. It can be examined from the information provided by the Commissioner of KPU Bone Bolango that community participation in the Bone Bolango regional election is quite high compared to that of Pohuwato and Gorontalo district. The community's voting behavior is the most significant factor since it is a part of community political participation. The voting behavior of the South Bulango district community in the 2020 Bone Bolango regional election is highly influenced by the candidates' place of origin and is in accordance with what the community reports. Apart from the place of origin, the community also notices the vision and mission conveyed by the pairing candidates of district head and vice-district head in Bone Bolango regional election in order to obtain information and to determine their choice

Keywords: community, political participation, regional election, voters' behavior

ABSTRAK

Iskandar N. Yantu. S21-17-032. Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bone Bolango di Tengah Pandemi Covid 19 (Studi Masyarakat Pemilih di Kecamatan Bulango Selatan).

Penelitian ini bertujuan yaitu untuk mengetahui perilaku pemilih masyaeakat di kecamatan Bulango Selatan serta bagaimana peran faktor pendukung dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam pilkada Kabupaten Bone Bolango ditengah pandemi covid 19. Metode yang digunakan di dalam penelitian ini melalui pendekatan kualitatif dengan penyajian secara deskriptif, dimana informan dalam penelitian ini adalah masyarakat wajib pilih yang sudah berumur 17 tahun keatas. Jumlah informan di sesuaikan dengan kebutuhan data, baik data primer ataupun sekunder yang terdiri dari Komisioner KPU Kabupaten Bone Bolango bidang Sumber Daya Manusia (SDM) serta masyarakat di Kecamatan Bulango Selatan. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data terbagi atas 3 bagian yaitu data reduksi, penyajian data (data display) dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pilkada Kabupaten Bone Bolango di Tengah Pandemi Covid 19 di Kecamatan Bulango Selatan, sudah dapat dikatakan baik. Hal ini dapat di ketahui dari informasi yang di berikan oleh Komisioner KPU Kabupaten Bone Bolango bahwa partisipasi masyarakat dalam pilkada Kabupaten Bone Bolango terbilang cukup tinggi dibandingkan dengan tingkat partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Gorontalo. Perilaku pemilih yang ada di tengah masyarakat menjadi faktor yang paling penting, di mana perilaku pemilih merupakan salah satu bagian dari partisipasi politik masyarakat. Perilaku pemilih yang ada masyarakat di Kecamatan Bulango Selatan dalam Pilkada Kabupaten Bone Bolango banyak pengaruhnya oleh faktor daerah asal calon dalam pilkada di tahun 2020 hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh masyarakat. Selain faktor daerah asal calon, masyarakat melihat visi-misi yang disampaikan oleh pasangan calon Bupati dan wakil Bupati dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bone Bolango untuk bisa memperoleh informasi serta menetapkan pilihan masyarakat terhadap pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango.

Kata kunci : abstrak, tujuan, metodologi, analisis, partisipasi politik, perilaku pemilih.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

- Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. (Q.S Al-Baqarah : 286)
- Maka apabila kamu telah selesai (dari segala urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. (Q.S Al-insyirah : 7)
- Selalu merasa optimis setiap melihat kesempatan dalam setiap kesulitan.

Persembahan :

Skripsi ini kupersembahkan untuk kedua orangtuaku tercinta Ayah Niman B. Yantu dan Ibu Yusran D. Radjak serta adik-adik aku, yang telah memberikan banyak motivasi, memberikan cinta dan kasih sayang serta kesabaran yang tidak pernah lupa berdoa untuk kesuksesanku.

Skripsi ini juga saya persembahkan untuk Almamater tercintaku Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan keafiatan kepada penulis untuk dapat merampungkan penulisan skripsi dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian, guna untuk memperoleh gelar sarjana strata satu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran serta menjelaskan mengenai **“PARTISIPASI POLITIK MASYRAKAT DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO DI TENGAH PANDEMI COVID 19 (Studi Masyarakat Pemilih di Kecamatan Bulango Selatan)“**.

Untuk itu, dengan segala keikhlasan dan kerendahan hati, penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Kedua orang tua tercinta dan keluarga atas segala kasih sayang, jerih payah,dan doa restunya dalam mendidik penulis.
2. Bapak Dr. Abdul Gaffar La Tjokke, M.Si sebagai Rektor Universitas Ichsan Gorontalo
3. Bapak Dr.Arman, S.Sos., M.Si sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Univesitas Ichsan Gorontalo dan juga selaku Pembimbing I, yang telah membimbing penulis serta memberikan saran ataupun masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skipsi guna kepentingan ilmu pengetahuan.
4. Ibu Swastiani Dunggio, S.IP.,M.SI, selaku Pembimbing II, yang telah membimbing penulis serta memberikan masukan yang sangat berguna untuk kepentingan penyelesaian skripsi.
5. Ibu Darmawaty Abd. Razak, S.IP., M.AP Sebagai Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo.

6. Bapak dan Ibu Dosen Universitas Ichsan Gorontalo yang sudah mendidik dan mengajarkan berbagai disiplin ilmu kepada penulis.
7. Kepada semua pihak yang ikut membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah SWT, melimpahkan balasan atas jasa-jasa mereka kepada kami. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa apa yang telah dicapai ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan adanya kritik dan saran yang konstruktif. Akhirnya penulis berharap semoga hasil yang telah dicapai ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Aamiin.

Gorontalo, 2021

Iskandar N. Yantu

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
Motto & Persembahan	ii
Kata Pengantar.....	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	6
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.4.1 Manfaat Teoritis	8
1.4.2 Manfaat Praktis	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGAKA PEMIKIRAN	9
2.1 Tinjauan Pustaka	9
2.1.1 Partisipasi Politik	9
2.1.2 Partisipasi Masyarakat dalam Politik.....	10
2.1.3 Bentuk-bentuk Partisipasi Politik	14
2.1.4 Partisipasi Politik Virtual	17
2.1.5 Faktor Pendukung Partisipasi Politik	19
2.1.6 Perilaku Pemilih dalam Partisipasi Politik	22
2.1.7 Pilkada di Tengah Pandemi Covid 19.....	31
2.2 Kerangka Pemikiran	33
BAB III OBYEK DAN METODE PENELITIAN	34
3.1 Obyek Penelitian	34
3.2 Metode Penelitian	34
3.2.1 Desain Penelitian	34
3.2.2 Lokasi Penelitian.....	35
3.2.3 Fokus Penelitian.....	35
3.2.4 Sumber Data	37
3.2.5 Informan Penelitian.....	38

3.2.6 Teknik Pengumpulan Data	39
3.2.7 Metode Analisis Data.....	40
BAB VI HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	43
4.1.1 Sejarah Terbentuknya Kabupaten Bone Bolango.....	43
4.1.2 Keadaan Demografi	45
4.1.3 Keadaan Geografi	48
4.1.4 Visi-Misi Kabupaten Bone Bolango.....	49
4.1.5 Gamabaran Umum Kecamatan Bulango Selatan	50
4.1.6 Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bone Bolango.....	51
4.2 Hasil Penelitian & Pembahasan.....	55
4.2.1 Hasil Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2020 di Kecamatan Bulango Selatan	57
4.2.2 Perilaku Pemilih dalam Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bone Bolango di Tahun 2020 di Kecamatan Bulango Selatan.....	62
4.2.3 Peran Faktor Pendukung dalam Meningkatkan Partisipasi Politik pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bone Bolango di Tengah Pandemi Covid 19.....	74
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	85
5.1 Kesimpulan.....	85
5.2 Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	89

DAFTAR GAMBAR

Kerangka Konseptual	33
Peta Kecamatan Bulango Selatan	51

DAFTAR TABEL

Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati & Wakil Bupati dalam pilkada Kabupaten Bone Bolango.....	54
Data Hak Pilih di Kecamatan Bulango Selatan.....	58
Pengguna Hak Pilih di Kecamatan Bulango Selatan	58
Pemilih Disabilitas.....	59
Penggunaan Surat Suara.....	60
Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati & Wakil Bupati Pada Pilkada Kabupaten Bone Bolango di Kecamatan Bulango Selatan.....	61
Daftar Lampiran.....	91

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan kepala daerah langsung (pilkada langsung) merupakan kerangka kelembagaan baru dalam rangka mewujudkan proses demokratisasi di daerah. Proses ini diharapkan bisa mereduksi secara luas adanya pembajakan kekuasaan yang dilakukan oleh partai politik yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Selain itu, pilkada secara langsung juga diharapkan bisa menghasilkan kepala daerah yang memiliki akuntabilitas yang lebih tinggi kepada rakyat. Meskipun makna langsung disini lebih berfokus pada hak rakyat untuk memilih kepala daerah, para calon kepala daerah lebih banyak di tentukan oleh partai politik.

Pilkada langsung di Indonesia sendiri dilaksanakan sejak juni 2005. Pelaksanaan pilkada langsung tersebut sebelumnya di dahului keberhasilan pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden pada tahun 2004. Penyelenggaraan pilkada langsung diintrodusir di dalam Undang Undang (UU) No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang merupakan UU hasil revisi atas UU NO 22 Tahun 1999 mengenai substansi yang sama. Semangat yang muncul dari pelaksanaan pilkada langsung diantaranya adalah untuk mengembalikan hak-hak politik rakyat yang selama ini dilakukan hanya melalui perwakilan mereka di DPRD. Pelaksanaan pilkada secara langsung

juga sebagai upaya untuk memperbaiki kehidupan demokrasi setelah terjadi pergantian rezim Orde Baru ke Reformasi.

Namun pada tahun 2015 pemilihan kepala daerah dilakukan secara serentak di indonesia. Pemilihan kepala daerah di maksudkan untuk memilih kepala daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yaitu gubernur di tingkat provinsi dan bupati /walikota di tingkat kabupaten kota. Pengisian jabatan kepala daerah di tingkat provinsi adalah sama dengan pengisian jabatan kepala daerah di tingkat kabupaten kota, yaitu di pilih secara langsung oleh rakyat. Konstitusi memberi dasar bahwa pemilihan umum kepala daerah di selenggarakan secara demokratis melalui mekanisme secara langsung oleh rakyat. Pemaknaan arti kata demokratis dalam ketentuan tersebut dengan memilih mekanisme pemilihan secara langsung sebagaimana di atur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (pemilihan kepala daerah) di dalam pasal 24 ayat (5) kepala daerah dan wakil kepala daerah di pilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan. Rumusan tersebut secara substansi tak berubah dan penyelenggara negara tetap menghendaki hal tersebut dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah yang menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Sebagai salah satu bentuk pelaksanaan otonomi daerah yaitu dengan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara langsung, dimana rakyat dapat langsung memilih para pemimpin yang dikehendakinya melalui mekanisme secara langsung. Diberikannya otonomi kepada daerah melalui

proses desentralisasi, maka pelayananan terhadap masyarakat akan lebih efektif di bandingkan dengan sistem yang sebelumnya. Dimana sistem sebelumnya kepala daerah hanya dipilih oleh perwakilan rakyat di DPRD.

Dalam konteks negara yang menganut sistem demokrasi pemilihan kepala daerah merupakan akses bagi masyarakat ataupun warganya untuk berpartisipasi dan berperan dalam menentukan siapa yang diantara mereka untuk dipercaya dan layak memimpin. Karena demokrasi yang berlangsung di tingkat lokal akan terbangun sampai demokratisasi di tingkat nasional. Dalam kesuksesan penyelenggaraan sebuah pemilihan, partisipasi rakyat menjadi indikator cukup penting karena tinggi rendahnya partisipasi menjadi tolak ukur dalam kualitas pemilihan itu sendiri. Penyelenggaraan sebuah pemilihan yang berkualitas merupakan sarana untuk memberi pemahaman tentang pemilihan melalui pendidikan politik, sosialisasi dan komunikasi untuk rakyatnya.

Partisipasi politik dianggap sebagai bagian dari legitimasi sebuah pemerintahan disebabkan suara yang diberikan oleh setiap warganya merupakan keberhargaan dari proses bernegara dalam sebuah pemilihan. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat partisipasi akan memberi pengaruh positif terhadap legitimasi pemerintahan. Keikutsertaan masyarakat dalam partisipasi politik pada pemilihan kepala daerah secara serentak yang pertamakali dilaksanakan di tahun 2015, partisipasi politik tak cukup menggembirakan karena masih banyak daerah yang tingkat partisipasi politik masyarakatnya tergolong cukup rendah. Pada pemilihan kepala daerah tersebut, tingkat

partisipasi politik masyarakat yang ditargetkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU) yakni sekitar 75,5 persen, tetapi pada kenyataannya partisipasi politik pada umumnya hanya sekitar 64,23 persen.

Adanya perlibatan masyarakat dalam partisipasi politik pada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang demokratis merupakan syarat penting pembentukan proses kepemimpinan dalam sebuah daerah. Oleh karena itu, pemilihan kepala daerah menjadi proses legitimasi kekuasaan bagi suatu daerah. Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah juga menjadi refleksi didalam melihat bagaimana proses pemerintahan lokal. Sebab melalui pemilihan kepala daerah, masyarakat akan memiliki kepala daerah yang definitif yang dalam kapasitas dan kewenangannya akan menentukan masa depan daerah tersebut dalam lima tahun mendatang.

Salah satu daerah peserta pemilihan kepala daerah serentak di tahun 2020 adalah Kabupaten Bone-Bolango. Dalam hal ini, Kabupaten Bone-Bolango telah ikut berpartisipasi di dalam proses demokrasi, di mana pada tahun 2015 kabupaten Bone-Bolango telah melaksanakan proses pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara serentak di Indonesia. Pada pemilihan kepala daerah (pilkada) tersebut partisipasi politik mencapai 87,51 persen di mana tingkat partisipasi politik di masyarakat terbilang cukup tinggi. Oleh karena itu, pada pemilihan kepala daerah di tahun 2020 di harapkan bisa lebih meningkat tingkat partisipasi masyarakat di daerah kabupaten Bone-Bolango agar kualitas pemilihan kepala daerah (pilkada) bisa menghasilkan pemimpin yang

mempunyai kapabilitas serta kinerja yang baik dan bisa memenuhi janji di waktu kampanyenya.

Walaupun pada pilkada di Tahun 2020, mengalami kendala disebabkan dengan adanya pandemi covid 19 yang melanda hampir diseluruh dunia termasuk Indonesia. Karena itu pilkada mengalami penundaan hingga akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020, yang sebelumnya direncanakan pemilihan kepala daerah secara serentak di lakukan di bulan september tahun 2020. Maka dari itu, pemerintah akan tetap melaksanakan pemilihan kepala daerah di tengah pandemi covid 19 dengan mematuhi protokol kesehatan.

Menyelenggarakan pemilihan kepala daerah di tengah pandemi covid 19 memang tidak mudah di bandingkan dengan pemilihan kepala daerah yang sebelumnya dengan kondisi normal pada umumnya. Dimana dalam kondisi normal dapat mengumpulkan banyak orang, namun di saat pandemi tidak lagi bisa mengumpulkan banyak orang karena untuk mencegah terjadinya kerumunan agar penyebaran virus bisa dikendalikan. Adanya dampak dari pandemi covid 19 berpotensi berkurangnya partisipasi politik karena tingginya kepedulian terhadap penyebaran virus.

Berbeda dengan pilkada yang sebelumnya, pilkada di tahun 2020 merupakan pilkada yang diselenggrakan di tengah pandemi yang sedang melanda di Indonesia bahkan di Provinsi Gorontalo itu sendiri. Namun pemerintah tetap melaksanakan pemilihan calon dan wakil calon kepala daerah dengan protokol kesehatan yang sesui dengan aturan KPU yang dibuat untuk pelaksanaan pilkada itu sendiri. Peraturan KPU yang mengatur tentang

penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yaitu PKPU NO 13 Tahun 2020 yakni Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil WaliKota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid 19).

Agar partisipasi politik masyarakat tidak turun dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Bone Bolango di tahun 2020, perlu adanya faktor dukungan partisipasi politik masyarakat seperti Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango, peran partai politik serta masyarakat. Peran KPU Kabupaten Bone Bolango dan Partai Politik ialah memberikan pendidikan politik kepada masyarakat tentang urgensi pesta demokrasi yang luber-jurdil (pemilu, bersih, jujur, dan adil) sebagai edukasi kepada masyarakat. Selain itu, KPU Kabupaten Bone Bolango dan Partai Politik memberikan edukasi tentang penyebaran covid 19 di masyarakat. Dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Bone Bolango, karakteristik masyarakat sebagai pemilih dalam pilkada serentak di tahun 2020, perlu di cermati sebagai perilaku pemilih. Dimana ditengah masyarakat yang heterogen perilaku pemilih dalam memilih pasangan calon kepala daerah merupakan bagian dari partisipasi politik masyarakat.

Dari uraian di atas maka pemilihan kepala daerah (pilkada) di Kabupaten Bone-Bolango 2020 belum diketahui apa saja peran faktor pendukung dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilihan kepala daerah di

Kabupaten Bone-Bolango Tahun 2020 di tengah pandemi covid 19 serta belum diketahui perilaku pemilih masyarakat dalam menghadapi pemilihan kepala daerah Kabupaten Bone-Bolango.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul : Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bone-Bolango di tengah Pandemi Covid 19. (Studi masyarakat pemilih di Kecamatan Bulango Selatan).

1.2Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah penulis uraikan, maka penulis memutuskan untuk membahas masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perilaku pemilih dalam partisipasi politik pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Bone-Bolango tahun 2020 di Kecamatan Bulango Selatan?
2. Bagaimana peran faktor pendukung dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Bone Bolango tahun 2020 di tengah pandemi covid 19?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud penelitian

Sebagaimana bunyi rumusan masalah, maka yang menjadi maksud penelitian ialah:

Partisipasi politik adalah kegiatan individu atau sekelompok orang yang ikut ambil bagian dari proses demokrasi untuk memilih penguasa secara langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum.

Tujuan penelitian

Sebagaimana maksud dari penelitian, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini diantaranya :

1. Untuk mengetahui perilaku pemilih dalam partisipasi politik pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Bone-Bolango tahun 2020 di Kecamatan Bulango Selatan.
2. Untuk mengetahui peran faktor pendukung dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Bone Bolango tahun 2020 di tengah pandemi covid 19.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang di harapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan teoritis,

Dengan adanya penelitian ini di harapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan pengembangan konsep keilmuan, khususnya di bidang kajian yang berhubungan dengan partisipasi politik masyarakat pada pemilihan kepala daerah ditengah pandemi covid 19.

2. Kegunaan praktis,

Hasil penelitian ini dapat membuka wawasan pemikiran dan menjadi bahan sumbangan pemikiran kepada masyarakat luas mengenai partisipasi politik masyarakat dalam pilkada Kabupaten Bone Bolango di tengah pandemi Covid 19.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 TINJAUAN PUSTAKA.

2.1.1 Partisipasi Politik

Menurut Budiardjo (2008:367) “Partisipasi politik adalah proses demokratisasi yang melibatkan seseorang ataupun sekelompok orang yang ikut serta secara aktif dalam proses kegiatan politik dalam suatu negara dengan memilih pemimpin negara secara langsung ataupun tidak langsung untuk memengaruhi proses kebijakan pemerintah (publik policy)”. Seorang tokoh masalah partisipasi Herbert McClosky (dalam Budiardjo, 2008:367) berpendapat bahwa “Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum”. Sedangkan menurut Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson (dalam Budiardjo, 2008:368) mereka berpendapat bahwa “Partisipasi politik adalah kegiatan warga yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif”.

Menurut Mujani, Liddle, Ambardi (2011:76) Partisipasi politik adalah partisipasi warga negara dalam pemilihan umum yang demokratis (voter turnout)

yang merupakan elemen dasar dari sebuah rezim demokrasi. Salah satu ciri dasar demokrasi adalah adanya persaingan bebas antar elit untuk memperjuangkan dukungan warga agar bisa memegang jabatan publik. Dukungan warga diterjemahkan ke dalam partisipasi pemilihan umum untuk memilih orang atau partai untuk mengisi posisi publik tersebut.

Dari penjelasan diatas maka penulis mengambil kesimpulan bahwa Partisipasi politik adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun sekelompok orang yang ikut ambil bagian dari proses demokrasi untuk memilih pemimpinnya secara langsung dalam proses pembentukan kebijakan publik.

2.1.2 Partisipasi Masyarakat Dalam Politik

Partisipasi dalam pemilihan kepala daerah adalah salah satu bentuk partisipasi politik, dan merupakan bentuk dari partisipasi yang paling elementer dalam demokrasi. Partisipasi politik adalah tindakan warga negara yang biasanya dilakukan secara sukarela untuk mempengaruhi keputusan publik (public policy). Menurut Verba dan Nie,1972;Parry,Moyser, dan Day 1992 (dalam Mujani, Liddle, Ambardi, 2011:4) Partisipasi adalah tindakan, bukan keinginan, maksud, minat, atau sikap pada umumnya. Partisipasi juga bukan bicara, misalnya membicarakan atau mendiskusikan masalah-masalah politik atau pemerintahan.

Menurut Brady 1999; Conway 2000 (dalam Mujani, Liddle, Ambardi, 2011:5) partisipasi politik memiliki empat kriteria dalam suatu entitas yakni (1) tindakan, (2) oleh orang biasa, (3) dilakukan secara sukarela, (4) untuk mempengaruhi kebijakan publik. Jika tindakan yang dilakukan oleh pejabat

publik, bukan orang biasa, maka tindakan ini tidak termasuk partisipasi politik. Jika tindakan tersebut tidak dilakukan secara sukarela tetapi dipaksa atau dibayar, maka ia bukan partisipasi politik. Jikalaupun tindakan sukarela oleh orang biasa tersebut tidak dimaksudkan untuk memengaruhi kebijakan atau kepuasan publik atau keputusan-keputusan yang menyangkut kepentingan orang banyak, maka tindakan tersebut bukan partisipasi politik.

Verba dan Nie 1972 (dalam Mujani, Liddle, Ambardi 2011:80) menyatakan bahwa “Partisipasi politik” adalah “semua kegiatan yang dilakukan oleh individu warga negara untuk mempengaruhi pilhan masyarakat atas jabatan pemerintah atau untuk mempengaruhi pilhan masyarakat atas jabatan pemerintah atau untuk mempengaruhi tindakan mereka sebagai pejabat pemerintah” (cf.Kaasedan Mars, 1979;Verba, Schlozman, dan Brady,1995; Conway, 2000) (dalam Mujani, Liddle, Ambardi 2011:80). Semua definisi mengenai partisipasi politik, menurut Brady 1999 (dalam Mujani. Liddle, Ambardi, 2011:80) mencakup empat konsep dasar: aktifitas atau aksi,warga negara biasa, poltik, dan pengaruh. “Aksi” atau “aktifitas dalam partisipasi poltik merupakan sesuatu yang dilakukan oleh warga negara. Partisipasi poltik bukanlah pemikiran, sikap, atau kecenderungan (Brady, 1999) (dalam Mujani, Liddle, Ambardi, 2011:80). Perasaan dekat dengan partai poltik, atau benci terhadap kebijakan pemerintah, misalnya bukanlah aktivitas, dan karenanya tidak dapat dimasukan ke dalam partispasi poltik. Memilih calon kepala daerah, penandatanganan petisi yang menunjukan ketidak setujuan terhadap suatu kebijakan tertentu, atau proses menentang keputusan pemerintah yang menaikan pajak pendapatan, merupakan

contoh-contoh aktivitas politik. Partisipasi politik adalah tindakan atau aktivitas, bukan keinginan, pendapat, keyakinan, kecenderungan, dan lain-lain , yang dalam psikologi politik masuk kedalam rubrik “political attitudes” atau sikap-sikap politik.

Beberapa peneliti mengenai partisipasi politik memasukan diskusi politik dan mengikuti berita politik di media massa sebagai dua bentuk lain dari partisipasi politik (Conway, 2000:3) (dalam Mujani, Liddle, Ambardi, 2011:81). Tetapi pandangan ini menyalahi definisi dasar aktivitas politik, dan karenanya tidak dapat di masukan ke dalam pengertian partisipasi politik. Mengikuti berita politik melalui media massa memang merupakan kegiatan, tetapi lebih bersifat pasif, dan lebih berkaitan dengan informasi politik, bukan dengan aksi politik itu sendiri. Diskusi politik juga sebuah tindakan, tetapi lebih merupakan “tindakan bicara,” lebih merupakan bentuk dari keterlibatan politik (political engagement) dan bukan aktivitas politik itu sendiri (Inglehart, 1981; Burns, Schlozman, dan Verba, 2001) (dalam Mujani, Liddle, Ambardi, 2011:81). Namun partisipasi politik bukan sekedar aksi, melainkan aksi oleh warga negara biasa, bukan elite pemerintah. Aksi oleh pemerintah bersifat politis, tetapi bukan partisipasi politik (Brady 1999) (dalam Mujani, Liddle, Ambardi, 2011:81). Aktivitas dalam perkumpulan sosial seperti kerja sosial tidaklah bersifat politis, sebab tidak diarahkan untuk mempengaruhi kebijakan atau aktivitas pemerintah, walaupun ia mungkin mempengaruhi suatu aksi politik seorang warga negara. Partisipasi politik adalah tindakan sukarela, yang berarti bahwa para pelakunya tidak dipaksa untuk melakukannya (Verba, Schlozman, dan Brady, 1995:38-9) (dalam Mujani, Liddle, Ambardi, 2011:81).

Studi-studi awal mengenai partisipasi politik pada 1950-an dan 1960-an berupaya menunjukkan bahwa partisipasi politik bersifat satu dimensi. Lane, 1959; Milbrath, 1965; cf. Kaase dan Marsh, 1979 (dalam Mujani, Liddle, Amabrdi, 2011:82). Skala partisipasi politik telah dibuat dari serangkaian item yang mengindikasikan seberapa besar seseorang berpartisipasi dalam politik. Studi yang lebih belakangan mengkritisi skala satu dimensi ini. Verba dan Nie (1972) (dalam Mujani, Liddle, Ambardi, 2011:82), misalnya, melihat bahwa partisipasi politik terdiri dari beberapa dimensi. Voting atau pemungutan suara dan demonstrasi tidak dapat ditempatkan pada suatu skala yang sama untuk mengindikasikan sebuah kontinum di dalam partisipasi politik. Demonstrasi merupakan satu bentuk partisipasi politik, sementara pemungutan suara adalah bentuk partisipasi politik yang lain. Di negara-negara demokrasi konsep partisipasi politik bertolak dari paham bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, yang dilaksanakan melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan-tujuan serta masa depan masyarakat itu dan untuk menentukan orang-orang yang akan memegang tampuk pimpinan. Jadi, partisipasi politik merupakan pengejawantahan dari penyelenggara kekuasaan politik yang abash oleh rakyat (Budiardjo, 2008:368).

Partisipasi politik erat sekali kaitannya dengan kesadaran politik, karena semakin sadar bahwa dirinya diperintah, orang kemudian menuntut diberikan hak bersuara dalam penyelenggaraan pemerintah. Perasaan kesadaran seperti ini dimulai dari orang yang berpendidikan, yang kehidupannya lebih baik, dan orang-orang terkemuka. Di negara-negara demokrasi umumnya dianggap bahwa lebih banyak partisipasi masyarakat lebih baik, di sebabkan tinnginya tingkat partisipasi

menunjukan bahwa warga mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan politik. Sebalinya tingkat partisipasi yang rendah pada umumnya di anggap sebagai tanda yang kurang baik, karena dapat ditafsirkan bahwa banyak warga tidak menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan (Budiardjo, 2008: 369).

2.1.3 Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik

Partisipasi politik dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, yang apabila dilihat sebagai suatu kegiatan, partisipasi politik dapat dibedakan menjadi partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Partisipasi aktif mencakup kegiatan warga negara untuk mengajukan usul mengenai kebijakan umum, mengajukan alternatif kebijakan yang berbeda dengan kebijakan pemerintah, mengajukan saran dan kritik untuk mengoreksi kebijakan pemerintah, membayar pajak dan ikut dalam proses pemilihan pimpinan pemerintahan. Sedangkan partisipasi pasif adalah kegiatan sikap mentaati peraturan pemerintah, menerima dan melaksanakan begitu saja setiap keputusan pemerintahan (Sastroamodjo, 1995:56) (dalam Muslim, 2018:17)

Sementara itu dilihat dari kadar dan jenis aktifitas, menurut Milbrath dan Goel (dalam Muslim, 2018:17) membedakan partisipasi politik dalam beberapa tipe, yaitu :

1. Tipe Apatis (masa bodoh), yaitu orang yang menarik diri dari aktifitas politik.

2. Tipe Spectator, yaitu orang-orang yang paling tidak pernah ikut pemilihan umum.
3. Tipe Gladiator, yaitu orang-orang yang secara aktif terlibat dalam proses politik yakni sebagai komunikator dengan tugas khusus mengadakan kontak dengan tatap muka, aktifitas partai dan pekerja kampanye, serta aktivis masyarakat.
4. Tipe Pengeritik, yaitu orang-orang yang berpartisipasi dalam bentuk yang tidak konvensional.

Jika dilihat dari bentuk partisipasi politik, Menurut Kaase dan Marsh 1979 (dalam Mujani, Liddle, Amabardi, 2011:82) partisipasi Politik secara umum terdiri dari dua bentuk yakni:

2.1.3.1 Bentuk partisipasi konvensional

Bentuk konvensional mencakup segala aktivitas oleh warga negara biasa untuk memengaruhi hasil akhir (outcomes) dari proses politik yang sesuai dengan prosedur atau aturan baku, seperti pemungutan suara seseorang calon untuk menduduki jabatan politik tertentu, atau kampanye menjelang pemilu.

2.1.3.2 Bentuk partisipasi tidak konvensional

Bentuk Partisipasi tidak konvensional adalah segala kegiatan yang tidak berhubungan dengan norma ataupun aturan yang berlaku yang mengatur tentang partisipasi politik masyarakat dalam rangka memengaruhi hasil akhir politik di bawah suatu rezim tertentu. Seperti demonstrasi ataupun perusakan fasilitas

umum sebagai bentuk protes terhadap keputusan tertentu dari pemerintah (Kaase dan Mars, 1979: 41) (dalam Mujani, Liddle, Amabardi, 2011:82)

Partisipasi pada pemilihan umum kepala daerah dalam bentuk memilih calon kepala daerah adalah salah satu bentuk dari partisipasi politik. Partisipasi politik dalam bentuk keikutsertaan dalam pemilihan umum seperti pemilihan presiden atau pemilihan kepala daerah (Voter turnout) adalah hal yang paling lumrah, dan biasanya, di manapun dalam demokrasi di dunia, paling banyak diikuti oleh warga negara (Mujani 2007). Dalam hal ini, seorang warga negara relatif tidak mengeluarkan biaya untuk melakukannya. Ia juga tidak memerlukan banyak waktu, skill, dan pengetahuan mendalam, tingkat konfliknya tidak terlalu tinggi dan karena itu risiko untuk di musuh atau bahkan cedera relatif kecil dibanding demonstrasi, misalnya. Namun demikian, partisipasi dalam pemilihan umum seperti pemilihan presiden (pilpres) atau pemilihan kepala daerah (pilkada) punya daya tekan politik yang sangat besar, karena ia akan menentukan nasib jabatan seseorang atau isu publik tertentu (Mujani, Liddle, Ambardi, 2011:5)

2.1.4 Partisipasi Politik Virtual

Penyelenggara pilkada langsung memberikan pilihan semakin beragam kepada masyarakat dalam menjalankan partisipasi politiknya. Pilihan bentuk partisipasi politik yang dimiliki masyarakat tidak lagi terbatas seperti sistem politik yang lama. Mereka memiliki akses yang lebih luas untuk berpartisipasi. Dalam konteks inilah, fenomena pilkada langsung memiliki korelasi dan relevansi dengan konsep demokrasi digital yang mengasumsikan semakin terbuka luasnya

ruang partisipasi politik warga negara yang tidak lagi terbatas pada ruang nyata tapi juga maya, sebagaimana ditegaskan oleh Saco dalam konsep demokrasi digitalnya. Semakin “lebarnya” saluran partisipasi politik dalam sistem pilkada langsung. “Ruang” baru yang bisa menjadi tempat baru warga negara untuk berpartisipasi politik dalam pilkada langsung adalah ruang maya. Masyarakat di daerah bisa menggunakan ruang maya sebagai sarana partisipasi politiknya. Mereka dapat mengekspresikan aspirasi, dukungan, dan preferensi politiknya melalui ruang maya, salah satunya media sosial. Dengan menggunakan media sosial seperti Facebook dan Twitter, masyarakat di daerah dapat mengekspresikan partisipasi politiknya dalam ajang pilkada langsung di daerahnya.

Korelasi antara fenomena pemilukada dan dunia maya ini sesuai dengan gagasan demokrasi digital Diana Saco dalam bukunya *Cybering Democracy: Publik Space and the Internet* (2002) (dalam Andriadi, 2017:75). Saco menawarkan sebuah konsepsi tentang demokrasi “model” baru sebagai alternatif bagi dunia maya. Konsepsi demokrasi yang mengafirmasi kehadiran nonfisik sebagai bentuk dari partisipasi politik. Bagi Saco, ruang maya layak untuk diafirmasi sebagai bagian dari ruang di masa mendatang, yaitu ruang dalam konteks nonfisik. Ini selaras dengan spirit demokrasi itu sendiri yang mengafirmasi partisipasi politik rakyat secara luas. Salah satunya melalui mekanisme Pemilukada. Selain itu, ini juga sesuai dengan karakter dasar dari media sosial itu sendiri yang mengakomodasi partisipasi bagi warga negara. Media sosial memiliki karakteristik berupa partisipasi, keterbukaan, perbincangan,

komunitas, dan keterhubungan. Karakteristik ini sesuai dengan spirit demokratisasi yang terkandung dalam Pemilukada.

Pada sisi yang lain, penggunaan ruang maya dalam partisipasi politik memberikan tantangan politik tersendiri bagi partai politik. Parpol dan juga kandidat pasangan yang maju dalam Pemilukada langsung dituntut untuk mampu melakukan transformasi budaya politik untuk dapat mengafirmasi sarana baru masyarakat dalam berpartisipasi ini, terutama generasi muda. Generasi muda adalah segmen pemilih yang sangat dekat dengan perangkat digital dalam kesehariannya. Jika partai politik mengkomodasi segmen ini sebagai pemilihnya, maka partai politik harus menyesuaikan kultur politiknya dengan kulturpolitik digital segmen ini.

Kompabilitas antara sistem pilkada langsung dengan ruang maya dalam konsep demokrasi digital adalah kesamaan spirit yang memacu partisipasi politik warga negara. Keduanya memiliki basis filosofi dan orientasi yang sama, yaitu menguatkan partisipasi politik warga negara melalui perluasan akses dan sarana partisipasi politik masyarakat. Ruang maya menjadi “ruang” baru bagi masyarakat untuk berpartisipasi politik dalam ajang pemilukada langsung.

2.1.5 Faktor Pendukung Partisipasi Politik Masyarakat

Demokrasi politik yang berlaku membutuhkan partisipasi pemilih. Partisipasi ini kemudian di ubah menjadi pemungutan suara politik yang mampu memberikan legitimasi kepada calon yang dipilihnya. Sehingga kualitas demokrasi dalam hal ini berbanding lurus dengan kuantitas partisipasi. Golput

dalam hal ini merupakan penyimpangan yang secara tidak langsung akan menurunkan kualitas demokrasi partisipatif. Jadi, itu menyiratkan bahwa bangsa ini harus mampu melawan tingginya angka golput. Pertama, ada semacam sikap apatis politik yang mengganggu para pemilih. Sikap apatis ini bisa jadi disebabkan oleh ketidakmampuan partai politik menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Banyaknya kader politik yang terlibat korupsi merupakan kristalisasi kualitas demokrasi politik yang bobrok, termasuk pilkada. Kedua, minimnya pendidikan politik bagi pemilih. Kesadaran politik bagi warga negara harus menjadi prioritas utama dalam proses politik. Di sini, beberapa pihak seperti penyelenggara pemilu, parpol, dan lembaga swadaya masyarakat harus melakukan pendidikan politik secara masif. Kesadaran politik pemilih merupakan jaminan kualitas demokrasi, mengingat suara pemilih sangat menentukan kepemimpinan nasional dan daerah. Ketiga, banyaknya golput bisa jadi karena minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan umum (KPU). Sosialisasi dalam hal ini tidak hanya terkait dengan hari pemilihan dan teknis. Namun, juga tentang program dan profil calon yang melakukan kontestasi politik. Sehingga ketika pemilih memahami pemilu secara substansial dan teknis, mereka akan mengambil tindakan politik. Orang-orang yang merupakan pemilik suara politik harus paham tentang pentingnya partisipasi politiknya dalam pemilu. Keempat, daftar pemilih tetap (DPT) yang berantakan. Fenomena kisruh kasus DPT di berbagai daerah tampaknya turut andil dalam partisipasi politik pemilih. Dalam beberapa kasus, masyarakat yang ingin memilih tetapi tidak terdaftar di DPT, akhirnya tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Hal ini secara masif akan

menimbulkan pesimisme politik di masyarakat, yang pada akhirnya akan diwujudkan melalui tindakan abstain. Dari sinilah pengembangan ataupun meningkatkan partisipasi politik masyarakat pemilih niscaya akan dilakukan. (Muslim, 2018:272-273).

Ada beberapa cara untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala daerah yakni :

2.1.5.1 Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dalam mendorong partisipasi politik masyarakat

Konsekuensi dari adanya pemilihan kepala daerah secara langsung, maka rakyat memiliki peran yang nyata dalam rangka ikut menentukan nasib daerahnya dengan perluasan partisipasi politik yang bersifat progresif melalui pemilihan umum dimana pemilihan umum merupakan salah satu cara untuk mewujudkan kehidupan demokrasi. Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat dibutuhkan penyelenggara pemilihan umum yang profesional serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas. Dalam hal ini diperlukan suatu lembaga yang mampu mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah yang mampu dan berkompeten, lembaga tersebut adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dimana mereka untuk mempersiapkan segala hal untuk pemilihan umum. KPUD juga memiliki tanggung jawab untuk mengarahkan masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam pelaksanaan pilkada, sehingga penyelenggaraan pemilihan dapat berjalan dengan tepat dan sesuai dengan asas demokrasi. Tingkat

keberhasilan penyelenggaraan pemilu/pilkada dapat dilihat berdasarkan partisipasi politik masyarakatnya (Muslim, 2018:273).

Persepsi tentang suksesnya pelaksanaan pilkada serentak seyogyanya tidak hanya dilihat dari angka partisipasi politik semata. Edukasi tentang urgensi pesta demokrasi yang luber-jurdil (pemilu, bersuhu, jujur, dan adil) sebagai proses regenerasi kepemimpinan menjadi sangatlah penting dilakukan sebagai tanggung jawab demokrasi, meski proses regenerasi lewat kaderisasi yang dilakukan oleh partai politi cenderung pragmatis (Muslim, 2018:273-274).

2.1.5.2 Peran Partai Politik dalam mendorong partisipasi politik masyarakat

Saat ini tidak dapat dipungkiri bahwa partai politik menjadi instrumen stabilitas politik yang sangat efektif. Peran serta partai politik dalam proses demokrasi menjadi hal yang amat penting, karena tanpa peran serta partai politik, negara akan mengalami destabilisasi politik. Bagi masyarakat indonesia tentunya tidak ada pilihan lain, bahwa pilkada langsung menjadi bagian integral antara partisipasi politik rakyat dengan partai politik itu sendiri. Konsekuensinya, individu-individu sebagai bagian dari masyarakat sekaligus pelaku politik dalam pilkada langsung dituntut terlibat aktif agar arena demokrasi ditingkat lokal berjalan dengan aman dan dengan tingkat partisipasi yang tinggi.

Peran partai politik telah diatur dalam UU NO 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik pada pasal 10 disebutkan: “tujuan khusus partai politik adalah meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan”. Selanjutnya dalam pasal 11

dijelaskan: “partai politik berfungi sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi Negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sosialisasi dan pendidikan politik oleh Partai Politik sedikitnya dilakukan dalam tiga hal, yakni: melalui sosialisasi para kader, pendidikan politik, dan melalui optimalisasi organisasi sayap parta (Muslim, 2018:279).

2.1.6 Perilaku Pemilih dalam Partisipasi Politik

Partisipasi politik dalam bentuk ikut serta dalam pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah (pilkada) adalah hal yang paling lumrah, dan biasanya, di manapun dalam demokrasi di dunia, paling banyak diikuti oleh warga negara. Kekurangan utama dari partisipasi dalam pemilu adalah rendahnya nilai informasi yang disampaikan. Seorang warga negara ikut memilih partai politik atau calon pejabat publik tertentu tanpa memberi informasi yang memadai tentang keinginan

yang sesungguhnya akan ia sampaikan lewat tindakan tersebut. Selain itu, tidak ada agenda eksplisit yang bisa disampaikan lewat partisipasi jenis ini (Verba dan Nie 1978) (dalam Mujani, Liddle, Ambardi, 2011:6)

Menurut Mujani, Lidle, dan Ambardi, perilaku pemilih dalam partisipasi politik di bagi menjadi tiga yaitu faktor sosiologis, faktor psikologis dan faktor pilihan rasional.

2.1.6.1 Faktor Sosiologis

Model sosiologis adalah model studi perilaku memilih yang pertamakali muncul dan berkembang di Eropa serta di Amerika pada tahun 1950-an. Model ini berasumsi bahwa perilaku memilih ditentukan oleh karakteristik sosiologis para pemilih, terutama kelompok etnik/kedaerahan/bahasa serta kelas sosial dan agama.

Model sosiologis untuk pemilihan umum (voter turnout) telah dikembangkan secara canggih dengan apa yang disebut sebagai model SES (socio economic status) (Verba dan Nie 1972; Parry, Moyser, dan Day 1992), lalu di sempurnakan dalam apayang disebut sebagai Civic Voluntary Model (Verba, Schlozman, dan Brady 1995; cf. Conway 2000) (dalam Mujani, Liddle, Ambardi, 2011:6). Inti dari dua model ini adalah bahwa seseorang berpartisipasi dalam pemilu karena kesadaran tentang arti penting pemilu bagi kepenting dirinya dan masyarakat banyak. Hasil pemilu akan menetukan kebijakan-kebijakan publik yang akan berkaitan dengan semua warga negara. Orang yang punya kesadaran ini biasanya

orang yang relatif berpendidikan. Oleh karena itu, dibandingkan yang kuang berpendidikan, mereka yang berpendidikan lebih mungkin untuk ikut pemilu.

Di samping pendidikan, status pekerjaan juga dianggap memengaruhi keikutsertaan seseorang dalam pemilu. Orang yang bekerja lebih mungkin ikut pemilu dibandingkan dengan yang sedang mencari pekerjaan. Alasannya, perhatian orang yang tak memiliki pekerjaan lebih berfokus pada upaya mencari pekerjaan, dan karena itu kemungkinan besar ia akan absen dalam kegiatan-kegiatan politik seperti pemilu.

Jenis pekerjaan juga dipercaya memengaruhi keikutsertaan dalam pemilu. Orang-orang yang bekerja di sektor yang lebih rentan terhadap kebijakan pemerintah, cenderung untuk ikut serta dalam pemilu ketimbang yang sebaliknya. Termasuk kedalam kelompok ini adalah pegawai pemerintah, kelompok pekerja yang bergaji (white collar), dan pengusaha. Pasalnya, bisnis mereka biasanya terkait dengan regulasi seperti kebijakan pajak. Karena itu, mereka tertarik untuk mendukung partai atau calon yang kira-kira akan membuat kebijakan yang tidak merugikan bisnis mereka.

Terkait dengan pendidikan dan jenis pekerjaan ini adalah tingkat pendapatan. Orang yang berpendapatan lebih baik memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk ikut serta dalam pemilu karena mereka mempunyai akses lebih luas terhadap informasi yang berkaitan dengan kebijakan publik. Ini merupakan sumber yang mendorong orang untuk menyakini bahwa pemilu adalah sesuatu yang penting bagi dirinya. Orang yang berpendapatan lebih baik juga terbiasa

hidup dalam lingkungan dengan norma-norma tertentu, sehingga memandang positif keikutsertaan dalam pemilu, dan memandang negatif absen dalam pemilu.

Namun, sebagian kalangan tidak percaya bahwa tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, dan tingkat pendapatan cukup untuk menjelaskan tingkat partisipasi dalam pemilu (voter turnout) (Verba, Schlozman, dan Brady, 1955) (dalam Mujani, Liddle, Ambardi, 2011:8). Orang yang memiliki kemungkinan lebih kuat untuk ikut dalam pemilihan umum ialah orang yang mempunyai status sosial-ekonomi lebih baik yang berada dalam jaringan sosial yang memungkinkan terjadinya proses mobilisasi politik. Orang-orang yang aktif dalam organisasi sosial yang formal ataupun informal memiliki informasi melalui pembicaraan sesama anggota sehingga itu mereka cenderung lebih terlibat dalam urusan-urusan publik. Mereka juga mudah dihubungi oleh orang, kelompok, atau partai yang berkepentingan dengan urusan partisipasi politik. Sementara itu, orang-orang yang jauh dari jaringan sosial, mereka tidak mendapat imformasi tentang partisipasi politik atau tidak bisa ikut dalam aksi mobilisasi disebabkan karena kurangnya informasi.

Warga negara yang tergabung didalam organisasi-organisasi sosial sangat beragam, dan sangat bergantung pada kultur dan tingkat perkembagan masyarakat sehingga mudah untuk melakukan proses mobilisasi sesuai dengan kultur masyarakat yang ada. Organisasi-organisasi sosial dan jaringan-jaringan primordial ataupun kelompok identitas (seperti agama dan kedaerahan), kelompok kepentingan (seperti organisasi buruh dan petani), mereka adalah orgamisasi yang membantu bagi partisipasi politik di masyarakat.

2.1.6.2 Faktor Psikologis

Menurut model ini, seorang warga berpartisipasi dalam pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah bukan saja karena kondisinya lebih baik secara sosial-ekonomi, atau karena berada dalam jaringan sosial, akan tetapi, karena ia tertarik dengan politik, punya perasaan dekat dengan partai tertentu (identitas partai), punya informasi yang cukup untuk menetukan pilihan, merasa suaranya berarti, serta percaya bahwa pilihannya dapat ikut memperbaiki keadaan (political offycacy).

Seseorang berpartisipasi dalam politik seperti memilih dalam pemilu, bukan saja karena ia berada dalam jaringan sosial, terlibat dalam kegiatan civic, tetapi ia ingin berpartisipasi. Walaupun ia terlibat (engaged) dalam kehidupan civic, ia tidak secara otomatis berpartisipasi dalam pemilu bila ia tidak ingin berpartisipasi (Verba, Schlozman, dan Brady 1995,343) (dalam Mujani, Liddle, Ambardi, 2011:22). Yang termasuk ke dalam political engagement ini adalah informasi politik atau pengetahuan politik, political interest (tertarik politik), internal efficacy, dan partisanship (identitas partai).

Informasi politik adalah informasi yang dimiliki seseorang tentang hal-hal yang berkaitan dengan politik atau yang berkaitan dengan kepentingan umum. Demokrasi sebagai sebuah sistem politik menuntut partisipasi dari warga negara biasa. Partisipasi ini mencakup banyak hal, seperti ikut serta dalam pemilu, menentukan kebijakan publik apa yang harus dilaksanakan oleh pemerintah, dan sebagaimana. Semua partisipasi ini kualitasnya sangat ditentukan oleh

pengetahuan partisipan tentang masalah-masalah publik tersebut. Secara ideal, demokrasi menuntut warga negara yang kompeten, yakni warga yang cukup tau atau punya informasi memadai tentang masalah di mana ia terlibat untuk memutuskan (Price 1999,592) (dalam Mujani, Liddle, Ambardi, 2011:23).

Orang yang punya informasi lebih banyak tentang masalah publik, cenderung lebih mampu menentukan sikap dan melakukan tindakan politik, seperti ikut serta dalam pemilihan umum. Sebaliknya, orang yang kurang punya informasi atau kurang tau masalah publik cenderung tidak bersikap, dan kemudian cenderung tidak bertindak, sehingga cenderung tidak berpartisipasi dalam memutuskan masalah yang berkaitan dengan kepentingan publik. Oleh karena itu, informasi politik dipercaya dapat membantu seorang warga ikut serta dalam pemilu.

Terkait dengan informasi politik adalah ketertarikan seorang warga terhadap politik atau masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan umum. Dalam demokrasi, orang yang tahu tentang masalah publik menyadari bahwa dirinya penting bagi kepentingan publik, dan karena itu kemudian tertarik dengan urusan publik tersebut. Pada gilirannya, ia ter dorong untuk bertindak sesuai dengan pandangannya bahwa keikutsertaan dalam memutuskan kepentingan publik tersebut menjadi lebih mungkin dibandingkan yang kurang tertarik dengan politik (Verba, Schlozman, dan Brady 1995) (dalam Mujani, Liddle, Ambardi, 2011:24).

Ketertarikan kepada politik juga dipercaya terkait dengan political efficacy, yakni perasaan seseorang bahwa dirinya mampu memahami dan

menetukan keadaan yang berkaitan dengan kepentingan publik; bahwa dirinya merasa optimis dan kompoten dalam melihat dan menyikapi masalah-masalah publik yang dihadapi suatu bangsa. Karena merasa bisa memahami dan mempengaruhi keputusan-keputusan publik, sekecil apapun, maka seorang warga cenderung melihat makna positif dari ketrlibatannya dalam masalah-masalah publik.

Sebaliknya, seorang warga yang merasa pesimis, apatis, sinis, atau teralienasi dari sistem politik di mana ia hidup, merasa tak mampu memahami apa yang sedang berlangsung dalam pemerintahan. Politik demokrasi dipandang sebagai sesuatu yang rumit, asing, dan tak ada sangkut pautnya dengan kepentingan seorang warga negara. Karena itu, segala aktuvitas yang berkaitan dengan kepentingan publik dipandang tidak berguna bagi dirinya, dan proses politik hanya menguntungkan kelompok kecil saja dari masyarakat. Warga yang apatis atau teralienasi ini cenderung absen dalam pemilu karena pemilu dianggap tidak berguna bagi kebaikan bersama, dan hanya menguntungkan segelintir elite atau partai saja.

Di samping itu, political engagement memberi pengaruh positif terhadap partisipasi politik. Karena itu political engagement merupakan bagian komponen dari partisanship atau identitas partai. Partisanship adalah suatu keadaan psikologis yakni merasa dekat dengan suatu partai politik tertentu. Partisanship merupakan identitas politik seorang warga negara karena warga tersebut punya kemampuan psikologis untuk mengidentikkan dirinya dengan sebuah partai politik. Oleh karena itu, partisanship di sebut dengan identitas partai seseorang.

2.1.6.3 Faktor Pilhan Rasional

Menurut perspektif rasionalitas pemilih ini, seorang warga berperilaku rasional. Yakni, menghitung bagaimana caranya mendapatkan hasil maksimal dengan ongkos minimal. Jadi, kalau seorang warga ingin mendapatkan hasil yang sama dari pemilu, lepas dari mikut ataupun tidak, maka warga tersebut seharusnya tidak ikut pemilu. Dengan kata lain, dalam perspektif pilihan rasional atau ekonomi-politik, seorang warga tidak akan ikut pemilu karena tidak ikut pemilu akan lebih menguntungkan.

Penganut perspektif pilihan rasioanl seperti Anthony Downs (1957) (dalam Mujani, Liddle, Ambardi, 2011:29) melihat bahwa jawabannya ada pada “nilai demokrasi,” sedangkan Riker dan Ordeshook (1968, 1962) (dalam Mujani, Liddle, Ambardi, 2011:30) menyakini bahwa kewajiban warga negara sebagai faktor penting yang membuat warga tetap dalam memilih atau pilpres dan pilkada meskipun tidak mendapatkan insentif personal. Bila nilai demokrasi atau rasa berkewajiban sebagai warga negara untuk ikut dalam pemilu lebih kuat dibandingkan ongkos yang diperlukan untuk mencapai nilai tersebut pada diri seseorang, maka orang tersebut kemungkinan besar akan ikut pemilu. Demikian juga sebaliknya.

Di pihak lain, ada argumen dari teori pilihan rasioanl yang menyatakan bahwa ongkos untuk beroartisipasi dalam pemilu sangat kecil, atau tidak signifikan bagi masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, masyarakat dapat berpartisipasi dalam pemilu (olsen 1965) (dalam Mujani, Liddle, Ambardi,

2011:30). Argumenini ini tetap saja tak bisa menjawab bahwa ongkos partisipasi, sekecil apapun, tetap ada, sementara hasil pemilu adalah barang publik yang nialinya tidak berbeda antara yang ikut dan yang tidak ikut menciptakannya. Oleh karena itu, teori pilihan rasional seharusnya tetap memperkirakan bahwa banyak warga negara mungkin tidak akan berpartisipasi dalam pemilu. Tetapi dalam kaitannya, mayoritas warga negara biasa berpartisipasi dalam pemilu.

Namun, Macy (1990, 1992; cf. Kanazawa 1998) (dalam Mujani, Liddle, Ambardi, 2011:31), penganut teori pilihan rasional lainnya mengatakan bahwa satu solusi di sebut model pembelajaran stokastik (stochastic learning model) dari partisipasi dalam pemilu. Berbeda dengan asumsi teori pilihan rasional sebelumnya dalam model ini, partisipan adalah orang yang belajar secara adaptif terhadap pengalaman sebelumnya (backward looking adaptive learner) sehingga mereka memilih atau tidak memilih didasarkan atas pengalaman sebelumnya.

Berkaitan dengan dinamika pilihan politik, maka model pilihan rasional memperhatikan dinamika politik ekonomi. Karena ekonomi politik lebih dinamis, sehingga kemungkinan dapat menjelaskan dinamika pilihan politik tersebut. Model ini bertumpu pada asumsi bahwa pilihan politik banyak dibentuk oleh evaluasi atas kondisi ekonomi, personal maupun kolektif. Dalam karya klasiknya, Economic Theory of Democracy, Anthony Downs (dalam Mujani, Liddle, Ambardi, 2011:32) menyatakan bahwa evaluasi positif wrga terhadap kondisi ekonomi akan memberikan reward (ganjaran) terhadap pejabat yang sedang menjabat. Sebaliknya, jika evaluasinya, maka dia akan menghukumnya dengan memilih lawan.

Dalam model ekonomi politik ini ditegaskan bahwa perilaku politik dipengaruhi oleh kepentingan ekonominya. Jika kondisi ekonomi rumah tangga pemilih dibawah pemerintahan saat ini lebih baik dari pada periode sebelumnya, maka pemilih cenderung memilih partai atau calon yang sedang berkuasa. Sebaliknya, jika pemilih merasa situasi ekonomi rumah tangganya sekarnng lebih buruk dari sebelumnya, maka ia cenderung menghukum pemerintah saat ini dengan tidak memilihnya kembali, kemudai memilih lawan dari partai atau calon yang berkuasa. Di sini egoisme pemilih ditekankan (Fiorina 1976) (dalam Mujani, Liddle, Ambardi, 2011:33).

Model pilihan rasional ini membutuhkan prasyarat kelembagaan tertentu. Evaluasi egosentrис, sosiotropis, retrospektif, dan prospektif diatas membutuhkan persaingan yang jelas antara incumbent dan lawannya. Tanpa itu, mekanisme reward dan punishment bagi petahana yang menjadi basis model ini tidak mudah dilakukan oleh pemilih.

2.1.7 Pilkada di Tengah Pandemi Covid 19

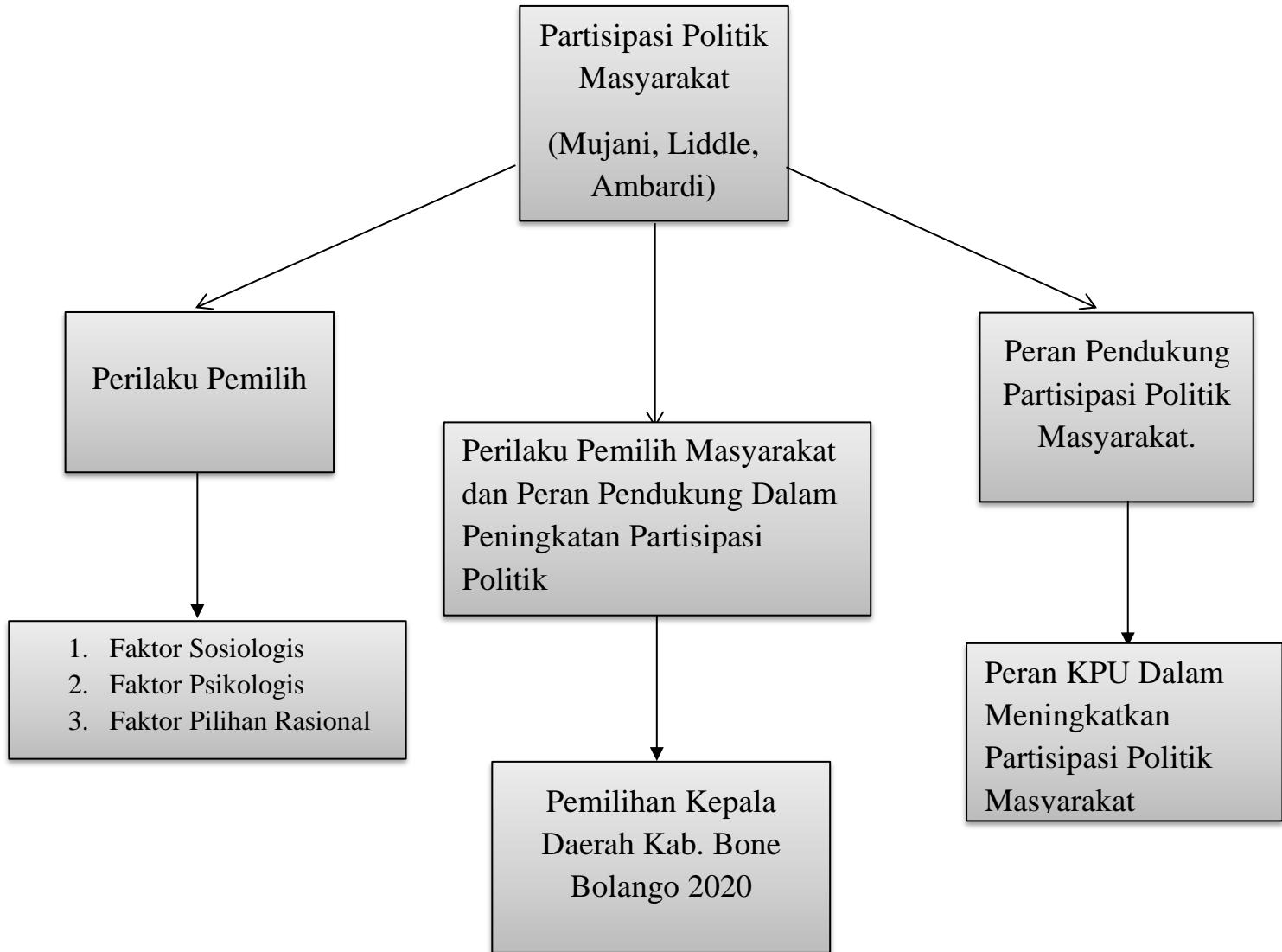
Menyelenggarakan pemilihan umum saat pandemi memang tidak mudah sejalan dengan standar demokrasi. Proses pemilihan umum yang normal dengan mengumpulkan banyak orang membuka peluang penyebaran virus. Dampak lainnya adalah potensi berkurangnya partisipasi politik karena tingginya kepedulian terhadap penyebaran virus (Clark, 2020: 12) (dalam Prayudi, 2020:4). Disamping itu, potensi terjadinya malpraktik pemilihan umum yang bahkan kerap terjadi pada waktu-waktu normal, lebih mungkin terjadi pada masa pandemi jika

keterbatasan yang dihadapi oleh pihak penyelenggara dan pihak pengawas disertai dengan keterlibatan masyarakat yang tidak optimal.

Penyelenggara pemilihan kepala daerah secara serentak di tahun 2020 harus bersinergi dengan gugus satuan tugas Covid-19 dan berbagai instansi terkait, termasuk pemerintahan daerah setempat. Pemilihan kepala daerah secara serentak tahun 2020 ditengah pandemi berpotensi berimplikasi pada demokrasi. Oleh karena itu, pembuat kebijakan harus menyikapi dengan prakondisi yang tepat. Sebagaimana di negara-negara lain yang menunda pemilihan umumnya dikarenakan adanya wabah covid 19. Indonesia pun belum memiliki pengalaman dalam menghadapi pemilihan umum ditengah pandemi sehingga menuntut persiapan ekstra dari seluruh pihak untuk dapat memetakan impilkasinya yang berpotensi mereduksi nilai-nilai demokratis di dalam pemilihan umum. Oleh karena itu, para pembuat kebijakan harus menyikapi dengan peraturan pemerintah menyangkut tentang pemilihan kepala daerah di tengah pandemi covid 19.

Pemerintah, DPR RI, dan KPU di hadapkan dengan dua pilihan, yaitu terkait pandemi namun juga tetap harus mampu mewujudkan pemilu demokratis. Pemilu dapat dikatakan demokratis apabila kedaulatan pemilih diutamakan dengan melihat kejujuran, keadilan, kebebasan, serta rahasia. Ditengah pandemi covid 19, setiap kebijakan harus sesuai dengan kondisi yang dialami oleh setiap daerah yang melaksanakan pilkada serentak di 270 daerah pemilihan.

2.2 Kerangka Konseptual



BAB III

OBYEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Obyek Penelitian

Dalam penelitian ini, yang menjadi obyek penelitian ialah partisipasi politik dan bagaimana peran faktor pendukung dalam meningkatkan partsisipasi politik serta perilaku pemilih di Kecamatan Bulango Selatan dalam pilkada Kabupaten Bone Bolango di Tengah Pandemi Covid 19.

3.2 Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan untuk mencapai tujuan penelitian dari penulis mengenai Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah di Tengah Pandemi Covid 19 (studi masyarakat pemilih di Kecamatan Bulango Selatan).

3.2.1 Desain Penelitian

Desain yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang di alami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi atau pandangan mengenai

permasalahan yang akan diteliti secara menyeluruh, dan melalui deskripsi berupa kata-kata dan bahasa dalam suatu konteks alamiah dengan memanfaatkan beberapa metode ilmiah. Selain itu, penelitian ini menggunakan jenis penelitian analisis deskriptif, dengan paradigma yang memberikan kesempatan kepada individu sebagai subjek penelitian dengan melakukan analisis. Kemudian dengan analisis tersebut, peneliti menganalisis masalah Partisipasi Politik Masyarakat, dan bagaimana peran faktor pendukung dalam meningkatkan partisipasi politik di tengah pandemi covid 19 serta perilaku pemilih masyarakat di Kecamatan Bulango Selatan dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Menurut Bogdan dan Taylor dalam Lexy Moleong (2008:48), penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang di amati.

3.2.2 Lokasi penelitian

Lokasi penelitian yang di pilih oleh penulis yakni di Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango yang akan menggelar pesta demokrasi yakni Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango di Tengah Pandemi Covid-19. Dimana dengan pertimbangan lokasinya mudah ditempuh dan mudah untuk mendapatkan data yang diperlukan.

3.2.3 Fokus Penelitian

Yang menjadi fokus penulis dalam penelitian ini ialah : untuk mengetahui bagaimana perilaku pemilih yang ada di masyarakat Kecamatan Bulango Selatan

dalam menghadapi pemilihan kepala daerah Kabupaten Bone Bolango. Dimana Perilaku Pemilih yang ada ditengah masyarakat menurut Mujani, Liddle, Ambardi, dibedakan menjadi tiga faktor yaitu Faktor Sosiologis, Faktor Psikologis dan Faktor Pilihan Rasional.

Faktor Sosiologis merupakan faktor yang melihat latar belakang demografi pasangan calon yang akan dipilihnya seperti asal daerah pasangan calon dan agama. Faktor Psikologis merupakan faktor yang identik dengan kedekatan partai politik tertentu karena ia tertarik dengan politik sehingga ia mempunyai hubungan emosional dengan partai tersebut. Sedangkan faktor rasional ialah faktor yang melihat suatu kondisi politik sehingga ia bisa melihat untung rugi bagi dirinya sendiri.. Faktor ini menempatkan pemilih pada posisi yang aktif serta selalu cenderung bertindak rasional, yaitu dengan memaksimalkan dan meninjau kerugian yang bisa didapat dari tindakan ataupun pilihan yang ia tentukan.

Serta yang menjadi fokus penelitian yang kedua yaitu untuk mengetahui bagaimana peran faktor pendukung dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam pilkada Kabupaten Bone Bolango, terutama peran KPU kabupaten Bone Bolango dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat kecamatan Bulango Selatan pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bone Bolango yang dilakukan ditengah pandemi Covid 19 yang sedang melanda di Indonesia terutama pada pilkada Kabupaten Bone Bolango di tahun 2020.

3.2.4 Jenis Data

Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer merupakan data pokok yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitiannya. Data primer adalah data yang diperoleh dari studi lapangan atau daerah penelitian dengan menggunakan teknik observasi langsung ataupun wawancara. Peneliti pergi langsung ke masyarakat umum untuk mengumpulkan data melalui komunikasi langsung dengan para informan dengan menggunakan beberapa alat bantu seperti alat tulis dan alat dokumentasi serta alat perekam.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang berupa buku, dokumen dan penelitian yang terkait. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari lokasi penelitian untuk mendapatkan informasi mengenai Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bone Bolango di tengah Pandemi Covid 19.

3.2.5 Informan Penelitian

Informan merupakan orang atau narasumber yang dianggap mengetahui permasalahan yang diteliti dan dapat memberikan informasi atau petunjuk yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Penentuan informan ini menggunakan purposive sampling yang digunakan peneliti, jika peneliti mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu di dalam pengambilan sampelnya atau penentuan sampel untuk tujuan tertentu (Ridwan 2018:63). Untuk menentukan informan, peneliti menggunakan teknik purposive sampling bertujuan untuk mendapatkan informasi dari para informan yang ditentukan oleh peneliti.

Adapun informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN
1	Sofyan Djama	Komisioner KPU Kab.Bone Bolango
2	Fikran Husain	Anggota PPS
3	Umar Adam	Masyarakat
4	Denny Tampilang	Masyarakat
5	Susanto Ngoalo	Masyarakat
6	Julianto Idji	Masyarakat
7	Heriyanto Ilomonu	Masyarakat
8	Eka Adede	Masyarakat
9	Findri Mahmud	Masyarakat
10	Rahman Suleman	Anggota kader Partai Politik

3.2.6 Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan jenis penelitian ini bersifat kualitatif, maka teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara :

1. Observasi

Observasi yaitu pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan. Terkadang memperhatikan fenomena-fenomena politik yang terjadi di masyarakat, atau kadang-kadang menggunakan pengamatan orang lain. Hal-hal yang menjadi observasi dilapangan yaitu mengenai keikutsertaan masyarakat dalam partisipasi politik pada pilkada Kabupaten Bone Bolango serta mencermati perilaku pemilih yang ada di masyarakat.

2. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan lisan untuk dijawab secara lisan kepada informan yang bertujuan untuk meperoleh keterangan lebih rinci mengenai informasi yang diperlukan oleh peneliti untuk studinya. Dengan wawancara ini maka peneliti dapat mrnghasilkan data sebanyak-banyaknya untuk diungkap dengan tujuan memperoleh informasi sesuai dengan keadaan partisipasi politik masyarakat dalam pilkada Kabupaten Bone Bolango di tengah pandemi Covid-19, khususnya masyarakat di Bulango Selatan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku yang relevan, foto-foto, laporan kegiatan, peraturan-peraturan, film dokumenter ataupun data yang relevan sesuai dengan penelitian..

3.2.7 Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik pengolahan data yang digunakan penulis ialah data yang diperoleh dari hasil penelitian yang diolah secara deskriptif kualitatif untuk menggambarkan dan menganalisis Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pilkada Kabupaten Bone Bolango di Tengah Pandemi Covid 19 (studi masyarakat pemilih di Kecamatan Bulango Selatan). Adapun angka-angka yang muncul dalam penelitian ini di maksudkan dianalisis secara kuantitatif, akan tetapi sebagai pelengkap terhadap analisa kualitatif, demi pencapaian tujuan penelitian ini.

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel. Miles dan Huberman (1984) (dalam Sugiyono, 2014:), mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktifitas dalam analisis data, yaitu

data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification. Langkah-langkah dalam melakukan analisis data sebagai berikut :

1. Data reduction

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkaikan, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya jika diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.

2. Data display

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Jika dalam penelitian kuantitatif penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, phis chard, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka dapat terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Yang paling sering

digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif.

3. Conclusion drawing/verification

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Mile dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, di dukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Sejarah Terbentuknya Kabupaten Bone Bolango

Kabupaten Bone Bolango adalah sebuah kabupaten di Provinsi Gorontalo, Indonesia. Kabupaten ini merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Gorontalo di tahun 2003. Kabupaten Bone Bolango di bentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 Tentang pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Goontalo (Lembaran Negara RI Tahun 2003 No 26 serta tambahan lembaran negara RI No 4269). Pada waktu dimekarkan Kabupaten Bone Bolango hanya terdiri atas empat wilayah kecamatan, yaitu:

1. Bonepantai
2. Kabilia
3. Suwawa, dan
4. Tapa.

Bertitik tolak Amanah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 serta mengingat Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tanggal 22 Desember yang mengatur Tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo yang kala itu hanya memiliki tiga daerah, sementara idealnya minimal harus memiliki lima

Kabupaten/Kota, maka atas semangat dan aspirasi seluruh kalangan masyarakat di empat kecamatan di Kabupaten Gorontalo masing-masing kecamatan Suwawa, Kabela, Tapa dan Bonepantai dibentuklah Komite Solidaritas Pembentukan Kabupaten Baru (KSPKB) yang berusaha, berjuang menjadikan empat kecamatan ini menjadi suatu daerah kabupaten. Tepat tanggal 6 Mei 2003 diresmikanlah Kabupaten Bone Bolango sebagai Kabupaten yang keempat di Provinsi Gorontalo sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango di Probvinsi Gorontalo.

Seiring berjalannya waktu Kabupaten Bone Bolango terdiri dari beberapa kecamatan yaitu :

1. Bone
2. Boneraya,
3. Bonepantai,
4. Botupingge,
5. Bulango Selatan,
6. Bulango Timur,
7. Bulango Ulu,
8. Bulango Utara,
9. Bulawa,

10. Kabilia,
11. Kabilabone,
12. Suwawa,
13. Suwawa Selatan,
14. Suwawa Tengah,
15. Suwawa Timur,
16. Tapa,
17. Tilongkabila, dan
18. Pinogu

4.1.2. Keadaan Demografi

Jumlah penduduk di Kabupaten Bone Bolango 160.154 jiwa dengan sebaran penduduk 81 jiwa/km². Di tahun 2017 luas wilayahnya mencapai 1.984,31 km². Serta memiliki 18 kecamatan, 5 kelurahan dan 160 desa. Dimana penambahan satu kecamatan, yakni Kecamatan Pinogu merupakan pemekaran dari kecamatan suwawa.

Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Bone Bolango, adalah sebagai berikut:

1. Kecamatan Bone terdiri atas 13 desa, yaitu : (1) Bilolantunga; (2) Cendana Putih; (3) Ilohuuwa; (4) Inogaluma; (5) Masiaga; (6) Molamahu; (7)

2. Monano; (8) Moodulio; (9) Muara Bone; (10) Sogitia; (11) Taludaa; (12) Tumbuh Mekar; dan (13) Waluhu.
3. Kecamatan Bonepantai terdiri atas 14 desa yaitu : (1) Batuhijau; (2) Bilungala; (3) Bilungala Utara; (4) Kamiri; (5) Lembah Hijau; (6) Ombulo Hijau; (7) Pelita Hijau; (8) Tamboo; (9) Tihu ; (10) Tolotio; (11) Tong; (12) Tunas Jaya; dan (14) Uabanga.
4. Kecamatan Boneraya terdiri atas 8 desa yaitu : (1) Alo; (2) Inomata; (3) Laut Biru; (4) Moopiya; (5) Mootayu; (6) Mootinelo; (7) Pelita Jaya; dan (8) Tambulilato.
5. Kecamatan Botupingge terdiri atas 7 desa yaitu : (1) luwohu; (2) Panggulo; (3) Panggulo Barat; (4) Tanah Putih; (5) Timbuolo; (6) Timbuolo Tengah; dan (7) Timbulo Timur.
6. Kecamatan Bulango Selatan terdiri atas 10 desa yaitu : (1) Ayula Selatan; (2) Ayula Tilango; (3) Ayula Timur; (4) Ayula Utara; (5) Huntu Selatan; (6) Huntu Utara; (7) Huntu Barat; (8) Lamahu; (9) Sejahtera; dan (10) Tinelo Ayula.
7. Kecamatan Bulango Timur terdiri atas 5 desa yaitu : (1) Bulotalangi; (2) Bulotalangi Barat; (3) Bulotalangi Timur; (4) Popodu dan (5) Toluwaya.
8. Kecamatan Bulango Ulu terdiri atas 7 desa yaitu : (1) Ilomata; (2) Mongoilo; (3) Mongoilo Utara; (4) Owata; (5) Pilolaheya; (6) Suka Makmur; dan (7) UPT Owata.

9. Kecamatan Bulango Utara terdiri atas 9 desa yaitu : (1) Bandungan; (2) Boidu; (3) Bunuo; (4) Kopi; (5) Lomaya; (6) Longalo; (7) Suka Damai; (8) Tuloa; dan (9) Tupa.
10. Kecamatan Bulawa terdiri atas 9 desa yaitu : (1) Bukit Hijau; (2) Bunga Hijau; (3) Kaidundu; (4) Kaidundu Barat; (5) Mamungaa; (6) Mamungaa Timur; (7) Mopuya; (8) Nyiur Hijau; dan Patoa.
11. Kecamatan Kabilia terdiri atas 8 desa dan 4 kelurahan yaitu: (1) Kelurahan Padengo; (2) Kelurahan Tumbihe; (3) Kelurahan Pauwo; (4) Kelurahan Olohuta; (5) Desa Dutohe; (6) Desa Dutohe Barat; (7) Desa Olohuta Utara: (8) Desa Poowo; (9) Desa Poowo Barat; (10) Desa Talango; (11) Desa Tangilingo dan (12) Desa Toto Selatan.
12. Kecamatan Kabilabone terdiri atas 9 desa yaitu : (1) Biluango; (2) Bintalahe; (3) Botubarani; (4) Botutonuo; (5) Huangobotu; (6) Modelomo; (7) Molotabu; (8) olele; dan (9) Olohuta.
13. Kecamatan Suwawa terdiri atas 10 desa yaitu : (1) Bulodawa; (2) Bube; (3) Bube Baru; (4) Bubeya; (5) Helumo; (6) Huloduotamo; (7) Tinelo; (8) Tingkohubu; (9) Tingkohubu Timur; dan (10) Ulanta.
14. Kecamatan Suwawa Selatan terdiri atas 8 desa yaitu : (1) Bonde Raya; (2) Bondawuna; (3) Bonedaa; (4) Bulontala; (5) Bulontala Timur; (6) Libungo; (7) Molintogupu; dan (8) Pancuran.
15. Kecamatan Suwawa Tengah terdiri atas 6 desa yaitu : (1) Alale; (2) Duano; (3) Lombongo; (4) lompotoo; (5) Tapadaa; dan (6) Tolomato.

16. Kecamatan Suwawa Timur terdiri atas 11 desa yaitu : (1) Bangio; (2) Dataran Hijau; (3) Dumbaya Bulan; (4) Panggulo; (5) Pinogu; (6) Pinogu permai; (7) Poduoma; (8) Tilangobula; (9) Tulabolo; (10) Tulabolo Barat; dan (11) Tulabolo Timur.
17. Kecamatan Tapa terdiri atas 7 desa yaitu : (1) Dunggala; (2) Kramat; (3) Langge; (4) Meranti; (5) Talulobutu; (6) Talulobutu Selatan; dan (7) Talumopatu.
18. Kecamatan Tilongkabila terdiri atas 12 desa yaitu : (1) Bongoime; (2) Bongopini; (3) Butu; (4) Iloheluma; (5) Lonuo; (6) Motilango; (7) Moutong; (8) Permata; (9) Tamboo; (10) Toto Utara; (11) Tanggulo; dan (12) tanggulo Selatan.
19. Kecamatan Pinogu terdiri atas 5 desa, yaitu : (1) Pinogu; (2) Bangio; (3) Pinogu Permai; (4) Dataran Hijau; dan (5) Tilonggibila.

4.1.3 Keadaan Geografi

Kabupaten Bone Bolango secara geografis teletak antara 00 derajat 18'25" – 00 derajat 48'21" LU dan 123 derajat 03'41" – 123 derajat 33'06" BT. Luas wilayah Kabupaten Bone Bolango secara keseluruhan adalah 1.984,58 km². Jika dibandingkan dengan wilayah Provinsi Gorontalo, luas Kabupaten ini sebesar 16,24 %.

Dimana Kecamatan terluas di Kabupaten Bone Bolango adalah Kecamatan Pinogu serta kecamatan yang memiliki luas terkecil ialah Kecamatan Bulango

Selatan. Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Bone Bolango memiliki batas-batas geografis yaitu :

- Sebelah Utara : Kabupaten Gorontalo Utara
- Sebelah Timur : Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
- Sebelah Selatan : Teluk Tomini
- Sebelah Barat : Kabupaten Gorontalo dan Kota Gorontalo

4.1.4 Visi-Misi Kabupaten Bone Bolango

Kabupaten Bone Bolango merupakan salah satu daerah bagian dari Provinsi Gorontalo serta pemekaran dari Kabupaten Gorontalo. Untuk mencapai kemajuan daerah yang lebih baik, maka Kabupaten Bone Bolango memiliki Visi dan Misi untuk kemajuan daerahnya. Visi-Misi Kabupaten Bone Bolango yaitu :

Visi : “Terwujudnya Bone Bolango Cemerlang 2021”

Bone Bolango Cemerlang adalah menjadikan kabupaten yang unggul dan terdepan berdaya saing serta berada pada tingkat peradaban yang tinggi.

Misi :

1. Mewujudkan Masyarakat Sejahtera dan Berkualitas.
2. Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Wilayah.
3. Mengembangkan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan.
4. Mewujudkan Tata Pemerintahan Modern yang Mengedepankan Pelayanan Masyarakat.

4..1.5 Gambaran Umum Kecamatan Bulango Selatan

Luas wilayah kecamatan Bulango Selatan secara menyeluruh ialah 9,87 km². Jika dibandingkan dengan wilayah Kabupaten Bone Bolango, luas kecamatan ini sebesar 0,5%. Sedangkan desa terluas di Kecamatan Bulango Selatan adalah Desa Huntu Barat dan desa yang memiliki luas terkecil ialah Desa Ayula timur. Sebagian besar permukaan tanah yang ada di Kecamatan Bulango Selatan adalah Aspal. Kecamatan Bulango Selatan juga langsung berbatasan dengan Kota Gorontalo. Berdasarkan posisi geografisnya kecamatan Bulango Selatan memiliki batas wilayahnya yakni :

- Utara : Kecamatan Tapa
- Timur : Kecamatan Tilongkabila
- Selatan : Kecamata Kota Utara (Kota Gorontalo)
- Barat : Kecamatan Telaga (Kabupaten Gorontalo)

Kecamatan Bulango Selatan merupakan salah satu dari 18 kecamatan yang ada di Bone Bolango, dengan jumlah 10 desa dan di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 31 Tahun 2007. Kecamatan Bulango Selatan merupakan daerah pemekaran dari Kecamatan Tapa dan berbatasan langsung dengan Kota Gorontalo, dimana merupakan objek penghubung antara Kabupaten Bone Bolango dengan Kota Gorontalo.



4.1.6 Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2020

Di negara yang menganut sistem demokrasi seperti Indonesia yang cenderung memiliki masyarakat yang heterogen. Dengan adanya pemilihan umum maka memungkinkan semua pihak terakomodasi dengan apa yang di cita-citakan sehingga terwujud kehidupan yang lebih baik. Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Dearah yang di lakukan di Tahun 2020 merupakan pemilihan umum yang pertamakali diadakan di tengah pandemi covid 19 yang sedang mewabah di Indonesia termasuk di kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo. Pemilihan umum yang awalnya akan diadakan di bulan September di undur hingga di bulan Desember dengan berbagai pertimbangan yang dilakukan

oleh pemerintah Indonesia sehingga pemilihan umum kepala daerah wakil kepala dan wakil kepala daerah bisa terlaksana dengan baik walaupun masih ada kekurangan. Pemilihan Umum yang bertujuan untuk terbentuknya masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, memiliki kebebasan berekspresi dan mendapatkan akses terpenuhinya hak-hak mereka sebagai warga negara.

Salah satu daerah di Provinsi Gorontalo yang telah sukses melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) serentak di Tahun 2020 ialah Kabupaten Bone Bolango. Kabupaten Bone Bolango bukanlah satu-satunya daerah di Provinsi Gorontalo yang ikut dalam Pemilihan Kepala Daerah secara serentak, teradapat juga Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Pohuwato yang telah sukses menyelenggarakan pemilihan Kepala Daerah di daerahnya dengan baik, lancar, dan aman.

Pada Pemilihan Kepala Daaerah Kabupaten Bone Bolango memiliki empat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango, dimana dua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati di usung dari partai politik dan dua lainnya maju sebagai calon Perseorangan (independen). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang. Pada pasal 40 ayat (1) bahwasanya prasyarat untuk partai politik agar dapat mendaftarkan calon kepala daerah harus memperoleh paling sedikit 20% dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% dari akumulasi

perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Jika pilkada kabupaten Bone Bolango mengacu pada pemilihan legislatif anggota DPRD Bone Bolango maka partai yang memiliki kursi di DPRD Bone Bolango ialah : Partai Nasdem, Demokrat, PKS, PPP, Golkar, Gerindra, PAN dan PDIP. Serta Partai yang tidak memiliki kursi di DPRD Bone Bolango ialah : PKB, PKPI, Perindo, PSI, PBB, Berkarya dan Partai Garuda. Jika mengacu dari perolehan suara pada pileg 2019, maka yang dapat mengusulkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango ialah partai yang anggotanya memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selain itu, di lihat dari Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, menunjukan hanyalah partai Nasdem yang dapat mengusung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupatinya di Kabupaten Bone Bolango tanpa koalisi karena menguasai 6 dari 25 kursi (24%) di DPRD Kabupaten Bone Bolango. Selain dari Partai Nasdem, partai lainnya tidak bisa mengusulkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati sehingga diharuskan setiap partai berkoalisi dengan partai lainnya agar bisa memenuhi ketentuan UU yang mewajibkan 20% ambang batas parlemen tersebut. Selain dari partai politik, pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Bone Bolango bisa maju secara Perseorangan (independen) sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 3 Tahun 2017 dengan ketetapan 10% dari DPT yang terdaftar, mengacu pada pemilihan umum terakhir.

Pada pemilihan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tahun 2020 tingkat pencapaian partisipasi politik mencapai 88,46 %. Di mana tingkat

partisipasi masyarakat cukup tinggi di bandingakan dengan pilkada di tahun 2015.

Pada pilkada serentak tahun 2020 di Provinsi Gorontalo, tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango tertinggi di Provinsi Gorontalo dibandingakan dengan Kabupaten Gorontalo dan Pohuwato yang ikut dalam pilkada serentak di tahun 2020. Dimana Kabupaten Gorontalo partisipasi pemilih 82,49 % dan Kabupaten Pohuwato 88,04 %.

Adapun hasil presentase perolehan suara Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pilkada Kabupaten Bone Bolango.

Tabel 4.1

No	Nama Pasangan Calon	Partai Yang Mengusung	Pencapaian Suara
1	Drs. H. Ismet Mile, MM dan Sukandi Talani	Jalur Perseorangan (indenpenden)	15,1 %
2	Hi. Hamim Pou, S.kom, MH dan Dr. Merlan Uloli, SE, MM	Nasdem, PKS dan Demokrat	48,8 %
3	dr. Rusliyanto Monoarfa dan Umar Ibrahim, S.AP	PPP, Golkar, Gerindra dan PAN	12,7 %
4	Hi. Mohammad Kilat Wartabone dan Syamsir Djafar Kiayi, ST. M.SI	Jalur Perseorangan (indenpenden)	29,3 %

4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan

Partisipasi politik erat sekali kaitannya dengan kesadaran politik, karena semakin sadar bahwa dirinya diperintah, orang kemudian menuntut diberikan hak bersuara dalam penyelenggaraan pemerintah. Perasaan kesadaran seperti ini dimulai dari orang yang berpendidikan, yang kehidupannya lebih baik, dan orang-orang terkemuka. Masyarakat yang berpartisipasi dalam proses politik, misalnya melalui pemberian suara atau kegiatan lain, ter dorong oleh keyakinan bahwa melalui kegiatan bersama itu kepentingan mereka akan tersalurkan atau sekurang-kurangnya diperhatikan, dan bahwa mereka sedikit banyak dapat memengaruhi tindakan dari mereka yang berwenang untuk membuat keputusan yang mengikat. Dengan kata lain, mereka percaya bahwa kegiatan mereka mempunyai efek politik (political efficacy) (Prayudi, 2020:4).

Dinegara-negara demokrasi umumnya dianggap bahwa lebih banyak partisipasi masyarakat, lebih baik. Dalam alam pikiran ini tingginya tingkat partisipasi menunjukkan bahwa warga mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan itu. Hal itu juga menunjukkan bahwa rezim yang bersangkutan memiliki kadar keabsahan (legitimacy) yang tinggi.

Sebaliknya, tingkat partisipasi yang rendah pada umumnya dianggap sebagai tanda yang kurang baik, karena dapat ditafsirkan bahwa banyak warga tidak menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan. Lagi pula, dikhawatirkan bahwa jika pelbagai pendapat dalam masyarakat tidak dikemukakan, piumpinan

negara akan kurang tanggap terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat, dan cenderung melayani kepentingan beberapa kelompok saja. Pada umumnya partisipasi yang rendah dianggap menunjukkan legitimasi yang rendah (Muslim, 2018:273).

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan wujud dari demokratisasi di tingkat lokal serta wujud dari kedaulatan rakyat di tingkat daerah dalam membentuk sejarah politik yang dapat mengubah pola paradigma berfikir terhadap demokrasi di tingkat regional. Pemilihan seorang kepala daerah merupakan mekanisme politik yang secara langsung melibatkan masyarakat di tingkat regional. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang awalnya hanya di pilih oleh perwakilan rakyat di daerah yaitu DPRD, namun di tahun 2004 pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di pilh secara langsung oleh rakyat di daerah merupakan wujud dari demokrasi di tingakat daerah. Pemilihan umum di tingkat regional membuka peluang selebarnya bagi siapapun untuk menetukan siapa pemimpinnya di daerah. Dalam konteks aplikasinya, masyarakat tidak lagi menjadi sebagai obyek politik, akan tetapi, sebagai subyek.

Dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat di tengah pandemi di libatkan semua pihak terkait yaitu Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU, partai politik, Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) serta masyarakat. Agar pihak yang terkait saling bersinergi untuk dapat meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dalam mendorong partisipasi politik masyarakat yaitu memberikan edukasi tentang urgensi pesta demokrasi yang luber-jurdil (pemilu, bersih, jujur, dan adil) sebagai proses

regenerasi kepemimpinan menjadi sangat penting dilakukan sebagai tanggung jawab demokrasi. Selain memberikan edukasi politik kepada masyarakat Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) juga memberikan edukasi tentang pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan protokol kesehatan yang ketat (Prayudi, 2020:4).

4.2.1 Hasil Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2020 di Kecamatan Bulango Selatan.

Faktor yang paling dominan dalam partisipasi politik ialah kesadaran politik setiap warganegara. Artinya kesadaran akan hak dan kewajiban yang saling berhubungan dengan pengetahuan tentang lingkungan masyarakat akan kegiatan politik menjadi ukuran seseorang untuk terlibat dalam proses partisipasi politik.

Untuk mengetahui partisipasi politik dapat dilihat dari data statistik KPUD Kabupaten Bone Bolango tentang tingkat partisipasi pemilih di kabupaten Bone Boalango pada Pilkada Kabupaten Bone Bolango tahun 2020. Berikut data Pilkada Kab. Bone Bolango mengenai Partisipasi Pemilih Pilup Tahun 2020 di Kecamatan Bulango Selatan :

Tabel 4.2**Data Pemilih dan Penggunaan Hak Pilih**

Data Pemilih	Laki-Laki	Perempuan	Total
Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A.3-KWK)	3.822	4.082	7.904
Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPh)	5	4	9
Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau Surat Keterangan (DPTb)	18	14	32
Jumlah Pemilih (1+ 2 + 3)	3.845	4.100	7.945

Pengguna Hak Pilih	Laki-Laki	Perempuan	Total
Pengguna Hak Pilih dalam DPT	3.192	3.612	6.804
Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilihnya	5	4	9
Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau Surat Keterangan (DPTb)	18	14	32
Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3)	3.215	3.630	6.845

Dilihat dari Statistik data KPUD Bone Bolango, diatas maka tingkat partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Bulango Selatan terbilang cukup tinggi dengan presentase partisipasi masyarakat dalam memilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati mencapai 89%. Dengan pembandingan yang tidak ikut dalam proses politik dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Bone Bolango (Golput) hanya 11 %. Ditengah masyarakat di Kecamatan Bulango Selatan terdapat kaum difabel (disabiliatas) yang berjumlah 51 pemilih yang terdaftar sebagai DPT, namun yang ikut menggunakan hak pilihnya hanya 14 pemilih. Dilihat dari berbagai faktor sehinnganya kaum disabilitas enggan memberikan hak suaranya dengan ikut memilih di TPS salah satu faktornya ialah adanya covid 19. Berikut ini data pemilih disabilitas di Kecamatan Buango Selatan :

Tabel 4.3

Data Pemilih Disabilitas di Kecamatan Bulango Selatan

NO	Data Pemilih Disabilitas	Laki-Laki	Perempuan	Total
1	Jumlah seluruh pemilih disabiliatas	19	32	51
2	Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	5	9	14

Pada pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango diperlukan penggunaan surat suara sebagai alat untuk mengukur tingkat

partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Bone Bolango di Tahun 2020. Dengan adanya surat suara tersebut maka Pemilihan Kepala Daerah sesuai dengan asas Pemilu yang bersifat Luber-Jurdil. Berikut ini data penggunaan surat suara di Kecamatan Bulango Selatan :

Tabel 4.4
Penggunaan Surat Suara

NO	Data Penggunaan Surat Suara	Total
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan 1.2, 1.3, 1.4)	8.113
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos	26
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan	1.242
4	Jumlah surat suara yang digunakan	6.845

Rincian Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango di Kecamatan Bulango Selatan

Tabel 4.5**Perolehan Suara**

NO	Perolehan Suara	Total
1	Jumlah Suara Sah	6.677
2	Jumlah Suara tidak Sah	168
3	Jumlah Suara Sah dan Suara tidak Sah	6.845

Tabel 4.6

**Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Calon Bupati dalam
Pilkada Kabupaten Bone Bolango Tahun 2020 di Kecamatan Bulango
Selatan**

NO	Data Perolehan Suara Pasangan Calon	Total
1	Drs. H. ISMET MILE, MM – SUKANDI TALANI	793
2	Hi. HAMIM POU, S.Kom, MH – Dr. MERLAN S. ULOLI, SE. MM	4.462
3	dr. RUSLIYANTO MONOARFA – UMAR IBRAHIM, S.AP	724
4	Hi. MOHAMAD KILAT WARTABONE – SYAMSIR DJAFAR KIAFYI, ST., M.si	698

Pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango ditahun 2020, nomor urut dua terlihat lebih unggul dari setiap pasangan calon dan wakil

calon Bupati Bone Bone Bolango. Dimana perolehan suara nomor urut dua terlihat lebih tinggi dengan perolehn suara mencapai 4462 suara dari setiap pemilih di kecamatan Bulango Selatan. Kecamatan Bulango Selatan merupakan basis dari pasangan nomor urut dua, tidak dimungkiri pasangan calon nomor urut dua terlihat lebih unggul dari pasangan calon lainnya, mengingat basis dari pasangan calon nomor urut dua yaitu di Kecamatan Tapa-Bulango.

4.2.2 Perilaku Pemilih Dalam Partisipasi Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2020 di Kecamatan Bulango Selatan.

Partisipasi dalam pemilihan kepala daerah adalah salah satu bentuk partisipasi politik partisipasi politik, dan merupakan bentuk dari partisipasi yang paling elementer dalam demokrasi. Partisipasi politik adalah tindakan warga negara yang biasanya diambil secara sukarela untuk mematuhi keputusan publik.. Menurut Verba dan Nie, 1972 : Parry, Moyser, dan Day 1992 (dalam Mujani, Liddle, Ambardi, 2011:4) mengungkapkan bahwa partisipasi politik adalah tindakan, bukan keinginan, maksud, minat, atau sikap pada umumnya. Partisipasi juga bukan bicara, misalnya membicarakan atau mendiskusikan masalah-masalah politik atau pemerintahan. Menurut Verba dan Nie 1972 (dalam Mujani, Liddle, Ambardi, 2011:80) menyatakan bahwa partisipasi politik adalah segala aktifitas yang dilakukan oleh individu-individu warga negara untuk memengaruhi pilihan orang-orang posisi pemerintahan atau untuk memengaruhi tindakan-tindakan mereka sebagai pejabat pemerintah.

Demokrasi identik dengan pelaksanaan kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam sistem politik yang demokratis, rakyat memiliki hak untuk memilih perwakilan, baik di parlemen maupun eksekutif seperti kepala negara atau kepala daerah serta berhak untuk terlibat dalam kontestasi politik itu sendiri. Robert A. Dahl (2001) (dalam Ferdian, 2019:20) mengungkapkan lima hal pokok dalam demokrasi, yakni : (1) Kesempatan dalam berpartisipasi yang efektif, (2) Persamaan hak dalam memberikan suara, (3) Mendapatkan pemahaman yang jernih, (4) Melaksanakan pengawasan akhir terhadap agenda, serta pencakupan orang dewasa.

Adanya perputaran kekuasaan dan diadakannya pemilihan umum secara teratur, merupakan syarat suatu negara dikatakan menganut sistem demokrasi. Salah satu bentuk perputaran kekuasaan dan pemilihan umum yang dilaksanakan secara rutin di Indonesia adalah pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten Kota. Pemilu sering di sebut sebagai pesta rakyat, yaitu peristiwa di mana rakyat menentukan pilihan siapa yang akan mewakili mereka.

Pelaksanaan demokrasi dapat dilihat melalui penggunaan hak pilih dalam pemilu, di mana masyarakat yang sudah memenuhi persyaratan berhak untuk menggunakan hak pilihnya. Hal ini selaras dengan penjelasan yang diberikan oleh C.B Machpelson 1973 (dalam Ferdian, 2019:21) perilaku memilih menjadim kajian menarik , karena berbagai faktor turut mempengaruhi pemilih dalam menentukan pilihannya. Yang menjadi faktor yang menentukan perilaku pemilih

dalam menentukan hak politik pilihannya antara lain faktor daerah atau daerah asal calon, identifikasi partai atau kedekatan pemilih dengan partai pengusungnya, dan program-program pasangan calon yang dianggap menguntungkan mereka jika calon tersebut terpilih. Selain itu, perilaku pemilih juga di pengaruhi oleh faktor keagamaan. Semuanya teridentifikasi dari faktor sosiologis, psikologis dan pilihan rasional.

Oleh karena itu, penulis mengambil kesimpulan bahwa perilaku pemilih yang melekat di masyarakat dibedakan menjadi tiga faktor yaitu : Faktor Sosiologis yang melihat latar belakang si calon seperti daerah asal calon, Faktor Psikologis yang didasari dekat dengan partai politik tertentu, dan Faktor Rasional yang melihat keuntungan dari pemilu yang di ikutinya. Karakteristik preferensi perilaku pemilih warga negara yang saling berbeda ini menjadikan demokrasi sebuah bentuk pemerintahanyang fleksibel. Artinya bersifat inklusif dan terbuka bagi berbagai tuntutan.

4.2.2.1 Faktor Sosiologis

Faktor ini menjelaskan bahwa perilaku politik seseorang di pengaruhi oleh faktor-faktor sosiologis. Faktor sosial-ekonomi, orang tua, kedaerahan atau etnis, pekerjaan, agama, tempat tinggal, jenis kelamin dan usia memiliki pengaruh yang sangat signifikan danam menentukan perilaku memilih. Ramlan Surbakti (2007) (Ferdian, 2019:23) menyatakan, pendekatan sosiologis melihat latar belakang demografi dan sosial ekonomi seperti jenis kelamin, tempat tinggal, pekerjaan, pendidikan, kelas, pendapatan dan agama, berpengaruh dalam menentukan pilhan

politik seseorang pada pemilihan umum. Faktor ini juga melihat adanya pengaruh identifikasi kelas sosial, yakni kesamaan cara pandang antara pemilih yang memiliki kedudukan sosial tertentu dengan kedudukan sosial partai politik. Atau hal tersebut ada diantara kedudukan sosial dirinya, dengan kedudukan sosial calon kandidat. Faktor kedaerahan sangat mempengaruhi pilihan seseorang dalam menentukan siapa calon yang akan dipilihnya. Jadi bisa dikatakan bahwa faktor sosiologis melihat lingkungan mempengaruhi nilai dan keyakinan politik seseorang.

Untuk mengetahui faktor sosiologis di masyarakat, maka penulis melakukan wawancara dengan masyarakat terkait dengan alasan masyarakat memilih salah satu pasangan calon Kepala Daerah Kabupaten Bone Bolango. Untuk itu penulis melakukan wawancara dengan Saudara Bapak Denny Tampilang (Wawancara 11 Januari 2020) :

“Alasan saya memilih salah satu pasangan calon kepala daerah karena pasangan calon tersebut merupakan putra asli dari Tapa-Bulango”

Kemudian Penulis melakukan wawancara dengan Saudara Bapak Umar Adam (Wawancara, Senin 11 Januari 2021) :

“Alasan saya menggunakan hak pilih karena saya tertarik dengan pasangan calon kepala daerah tertentu karena pasangan calon tersebut merupakan orang Tapa”

Selain faktor sosiologis identik dengan faktor kedaerahan. Faktor sosiologis juga melihat latar belakang demografi dan sosial ekonomi seperti pekerjaan dan keagamaan. Untuk mengetahui faktor sosiologis di masyarakat terkait dengan

status pekerjaan. Maka dari itu, penulis melakukan wawancara dengan Saudara Bapak Denny Tmpilang. (Wawanvara, Senin 11 Januari 2021) :

“Dengan ikut memilih salah satu pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah serentak, saya bisa melihat adanya regulasi tentang pekerjaan dalam Visi-Misi pasangan calon tersebut”

Kemudian Penulis melakukukan wawancara dengan Suadara Bapak Umar Adam (Wawancara 11 Januari 2021) terkait dengan visi-Misi pasangan calon Kepala Daerah Kbupaten Bone Bolango :

“Dengan melihat visi-misi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Bone Bolango, saya tertarik dengan salah satu pasangan calon tersebut mengenai masyarakat yang mandiri dalam ekonomi yang berhubungan dengan pekerjaan”

Selain itu, faktor sosiologis juga tidak hanya di lihat dari latar belakang demografi ekonomi tetapi juga di dasari oleh faktor keagamaan. Terkait dengan faktor keagamaan tersebut, maka penulis melakukan wawancara dengan saudara Bapak Susanto Ngoalo (Wawancara 11 Januari 2021) :

“Saya memilih pasangan calon tersebut dalam pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati karena orangnya alim di mata saya”

Kemudian Penulis Melakukan wawancara terkiat dengan faktor keagamaan dengan Saudara Bapak Denny Tampilang (Wawancara 11 Januari 2021) :

“Saya melihat dari seluruh pasangan calon kepala daerah, hanya pasangan kepala daerah yang saya pilih kemarin terlihat lebih religious”

4.2.2.2 Faktor Psikologis

Menurut model ini, seorang warga berpartisipasi dalam pemilihan umum ataupun kepala daerah bukan saja karena kondisinya lebih baik secara sosial-ekonomi, atau karena berada dalam jaringan sosial, akan tetapi ia, karena ia tertarik dengan politik, punya perasaan dekat dengan partai tertentu (identitas partai), punya informasi yang cukup untuk menetukan pilihan, merasa suaranya berarti, serta percaya bahwa pilihannya dapat ikut memperbaiki keadaan (political offycacy).

Seseorang berpartisipasi dalam politik seperti memilih dalam pemilu, bukan saja karena ia berada dalam jaringan sosial, terlibat dalam kegiatan civic, tetapi ia ingin berpartisipasi. Walaupun ia terlibat dalam kehidupan civic, ia tidak secara otomatis berpartisipasi dalam pemilu bila ia tidak ingin berpartisipasi (Verba, Schlozman, dan Brady 1995, 343) (dalam Mujani, Liddle, Ambardi, 2011:22).

Identifikasi partai atau kedekatan pemilih dengan partai yang mengusung pasangan calon merupakan model identifikasi psikologis. Yang di sorot oleh partai ini adalah bagaimana persepsi pemilih terhadap partai politik yang ada, atau bagaimana hubungan emosional pemilih dengan partai politik tertentu. Untuk mengetahui faktor psikologis di masyarakat maka penulis melakukan wawancara dengan Saudara Bapak Rahman Suleman (Wawancara Senin 11 Januari 2021)

terkait dengan ikut terlibat dalam proses kampanye pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Bone Bolango :

“Ya, saya ikut bergabung dalam tim sukses pasangan calon tertentu pada pilkada Kabupaten Bone Bolango dengan ikut kampanye bersama tim sukses untuk memenangkannya dalam pilkada Bone Bolango Tahun 2020”

Mempunyai hubungan emosional dengan salah satu partai yang ikut dalam proses Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bone Bolango tahun 2020 merupakan ciri-ciri dari faktor psikologis, di mana pemilih lebih dekat atau punya hubungan dengan partai-partai politik. Maka dari itu, penulis melakukan wawancara dengan Saudara Bapak Rahman Suleman (Wawancara Senin 11 Januari 2021)

“Ya, saya mempunyai hubungan emosional dengan partai politik tertentu karena saya merupakan kader politik tersebut”

Kemudian penulis melakukan wawancara terkait dengan kampanye yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon Kepala Daerah dengan Saudara Bapak Julianto Idji (Wawancara Selasa 12 Januari 2021)

“Ya, Karena ketrlibatan saya adalah untuk mencari informasi tentang paslon, sehingga saya mentapkan di satu paslon yang memang bisa membantu masyarakat dan bisa memahami kondisi yang memang sangat dibutuhkan di wilayah ini”

4.2.2.3 Faktor Rasional

Pemilih rasional adalah pemilih yang menghitung untung-rugi bagi dirinya sendiri. Sebuah tindakan di anggap menguntungkan diri pemilih apabila ada manfaat sebesar-besarnya dengan ongkos yang sekecil-kecilnya bagi dirinya sendiri dari tindakan tersebut. Kalau bisa mendapatkan pejabat dan kebijakan publik tanpa harus keluar ongkos dalam bentuk pergi ke TPS yang setidaknya memerlukan waktu dan memastikan terdaftar sebagai pemilih, mengapa harus ikut memilih, apalagi pejabat dan kebijakan publik itu bersifat publik, yang manfaatnya akan sama saja bagi setiap warga, apakah warga tersebut mengeluarkan ongkos ataupun tidak, memilih ataupun tidak memilih. Oleh karena itu, pemilih yang rasional cenderung tidak ikut memilih dalam pemilu (Mujani, Liddle, Ambardi, 2011:452-453).

Kecenderungan semakin rasionalnya pemilih Indonesia dalam mewujudkan kekuasaannya terlihat lebih nyata dalam menetukan siapa yang berkuasa, atau yang mendapat mandat dari rakyat, diantara elit-elit politik. Rakyat menghitung atas dasar apa calon atau partai yang dipilih, bukan karena alasan primordial. Agama, suku bangsa, dan kelas sosial ternyata bukan faktor-faktor terpenting bagi rakyat dalam memberikan mandat kepada elit untuk memimpin mereka (Mujani, Liddle, Ambardi, 2011:454).

Faktor Rasional menempatkan pemilih pada posisi yang aktif, asumsi dari faktor ini bahwa seseorang selalu cenderung bertindak rasional, yaitu memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan kerugian yang bisa di dapat dari

tindakan yang dia lakukan. Faktor ini juga sering di kaitkan dengan ekonomi karena rasionalitas para pemilihnya di dasari oleh faktor ekonomi.

Untuk mengetahui faktor psikologis di masyarakat, maka penulis melakukan wawancara dengan Saudara Ibu Eka Adede (Wawancara Selasa 12 januari 2021) :

“Ya, saya ikut memilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati pada pemilihan kepala daerah kemarin karena saya melihat program salah satu pasangan calon yaitu tentang tenaga medis, pemerintah membuka tenaga kerja daerah yaitu perawat untuk bekerja di salah satu rumah sakit daerah yang ada di Kabupaten Bone Bolango”

Dari hasil wawancara dengan para informan mengenai perilaku pemilih yang ada di masyarakat Kecamatan Bulango Selatan, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa perilaku pemilih yang ada di masyarakat terbagi menjadi tiga faktor yaitu faktor sosiologis, faktor psikologis serta faktor rasionalitas masyarakat. Namun yang paling menonjol di tengah perilaku pemilih di masyarakat ialah faktor sosiologis.

Perilaku Pemilih merupakan bentuk partisipasi pemilihan umum atau partisipasi politik, dan merupakan bentuk partisipasi paling dasar dalam demokrasi. Sesuai dengan hasil wawancara dengan masyarakat Saudara Bapak Fikran Husain (Wawancara 12 Januari 2021), beliau mengatakan :

“Saya ikut dalam pemilihan kepala daerah itu didasari karena kewajiban saya sebagai warga negara kemudian bisa memilih kepala daerah yang sesuai dengan

hati nurani saya agar kepala daerah yang akan memimpin kedepannya akan membawa daerahnya akan lebih baik”

Sependapat dengan Saudara Bapak Fikran Husain, Saudara Ibu Eka Adede mengeanai alasan seseorang menggunakan hak pilih, Sauadara Ibu Eka Adede (Wawancara 12 Januari 2021) Mengatakan :

“Pada Pemilihan Kepala Daerah Kemarin, saya menggunakan hak pilih saya karena sebagai warga negara yang baik harus ikut berpartisipasi dalam memeberikan hak suaranya, dan saya juga sudah wajib pilih”

Kemudian hasil wawancara dengan Saudara Ibu Findriani Mahmud (Wawancara 12 Januari 2021), tentang hal yang mendasari seseorang untuk ikut berpartisipasi dalam pilkada Kabupaten Bone Bolango :

“Ia, saya ikut memilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango didasari karena saya sudah wajib pilih serta suara saya adalah suara masa depan bangsa untuk kedepannya”

Kemudian hasil wawancara terkait dengan terkait dengan partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah serentak di tahun tahun 2020, dengan melakukan wawancara dengan Saudara Bapak Julianto Idji (Wawancara 12 Januari 2021) :

“Membuat saya untuk ikut memilih karena perlu kita ketahui bahwa memilih bukan adalah hal yang biasa akrena memilih dalam pilkada adalah hak dan

kewajiban sebagai warga negara Indonesia untuk memilih pemimpin yang bijaksana”

Berbeda dengan pendapat diatas, pemilih yang menggunakan hak pilihnya atas dasar sebagai warga negara dan juga untuk kepentingan daerahnya yang lebih baik lagi, maka ada sebagian masyarakat menggunakan hak pilihnya hanya untuk ikut-ikutan saja. Hal ini sesuai dengan pendapat Saudara Bapak Heriyanto Ilonu (Wawancara 12 Januari 2021) :

“Saya ikut memilih pada pilkada kemarin hanya ikut-ikutan saja agar suara saya tidak hilang untuk pasangan calon yang saya pilih”

Dari hasil wawancara diatas, maka penulis mengambil kesimpulan mengenai alasan seseorang menggunakan hak pilihnya karena sudah wajib pilih serta sebagai warga negara yang baik harus peduli terhadap daerahnya dengan menggunakan hak suara politiknya pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bone Bolango agar dapat menentukan pemimpin yang bisa membawa daerah Kabupaten Bone Bolango lebih maju lagi. Walaupun masih ada sebagian pemilih di masyarakat yang menggunakan hak pilihnya hanya untuk ikut-ikutan saja agar hak suara politiknya tidak hilang.

Pada Pemilihan Calon dan Wakil Calon Bupati dan dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bone Bolango, informasi seputaran pilkada sangatlah penting untuk masyarakat agar masyarakat yang sudah wajib pilih bisa menentukan siapa calon dan wakil calon kepala daerah yang kompoten untuk memimpin daerahnya sendiri. Untuk mengetahui hal ini, maka penulis melakukan

wawancara dengan saudara Ibu Findriani Mahmud mengenai informasi seputaran pilkada Kabupaten Bone Bolango (Wawancara 12 Januari 2021) :

“Saya mendapatkan informasi mengenai pilkada melalui teman-teman saya di KPPS, kebetulan saya juga termasuk sebagai anggota KPPS kemarin pada pilkada Kabupaten Bone Bolango di tahun 2020”

Berbeda dengan pendapat saudara Ibu Findriani Mahmud, pendapat Saudara Bapak Heriyanto Ilonu mengenai informasi seputaran pilkada tahun 2020 (Wawancara 12 Januari 2021) :

“Saya mendapatkan informasi mengenai pilkada lewat media sosial”

Dari hasil wawancara tersebut, maka penulis menyimpulkan bahwa informasi seputaran pilkada Kabupaten Bone Bolango dapat di akses melalui media sosial serta informasi dari masyarakat mengenai Visi-Misi pasangan calon dan wakil calon kepala daerah Kabupaten Bone Bolango di tahun 2020.

Terkait dengan corak pluralistik dari preferensi warga negara adalah kepentingan yang ada di tengah masyarakat. Dengan adanya kepentingan tersebut maka sudah menjadi hal yang lumrah bagi negara yang menganut sistem demokrasi. Perilaku seperti ini salah satu bagian dari partisipasi politik masyarakat. Perilaku pemilih sebagai elektoral, yakni termasuk dalam hak pemberian suara (Votes) bantuan untuk kampanye, bekerja dalam suatu pemilihan atau tindakan lain yang direncakan untuk mempengaruhi proses pemilihan umum.

4.2.3 Peran Faktor Pendukung Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bone Bolango ditengah Pandemi Covid 19.

Indonesia yang menganut sistem demokrasi, dimana sistem ini melibatkan warganya untuk memilih para pemimpin diantara mereka melalui partisipasi politik mereka. Partisipasi politik masyarakat merupakan sarana untuk menyampaikan aspirasi dari rakyat untuk pemimpin yang sedang berkuasa. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dianggap sebuah legitimasi untuk pemerintah agar pemerintah bisa terkontrol dalam mengelola pemerintahannya.

Dengan adanya demokrasi politik yang berlaku saat ini maka melibatkan masyarakat dalam hal partisipasi politik, sehingga partisipai pemilih di ubah menjadi suara politik yang mampu memberikan legitimasi kepada calon yang dipilihnya, sehingga kuantitas partisipasi berbanding lurus dengan kualitas demokrasi itu sendiri. Kualitas demokrasi saat ini tengah terganggu dengan adanya kaum golongan putih (Golput). Dimana sebagian dari mereka sudah tidak perduli lagi dengan demokrasi saat ini. Dengan berbagai alasan, salah satunya ialah dinasti politik (Muslim. 2018:272).

Dinasti politik merupakan kekuasaan yang secara turun temurun dilakukan dalam suatu kelompok keluarga yang masih terikat hubungan darah, tujuannya untuk mempertahankan ataupun merebut kekuasaan. Dalam pilkada serentak tahun 2020, ada beberapa daerah yang dianggap oleh masyarakat melakukan dinasti politik seperti yang terjadi dalam pilkada Kota Solo dan Medan dimana

salah satu anak Presiden dan Mantunya ikut maju dalam pilkada tahun 2020. Ada juga beberapa daerah lainnya di Indonesia yang melakukan hal yang sama (dinasti politik) dikarenakan memiliki hubungan kekeluargaan dengan beberapa tokoh nasional sehingga mereka ikut maju dalam pemilihan kepala daerah secara serentak di tahun 2020.

Selain faktor dinasti politik, ada sebagian masyarakat yang enggan tidak ikut berpartisipasi dikarenakan adanya pandemi covid 19. Pandemi Covid 19 yang sedang melanda di Indonesia termasuk daerah yang sedang mengadakan pemilihan kepala daerah secara serentak di tahun 2020. Oleh sebab itu, di perlukan regulasi yang mengatur pemilihan kepala daerah tanpa mengabaikan protokol kesehatan. Salah satu faktor pendukung dalam partisipasi politik adalah Komisi Pemilihan Umum, di mana salah satu tugas KPU ialah meningkatkan partisipasi politik masyarakat walaupun pemilu di adakan di tengah pandemi covid 19.

Pada tahun 2020 di adakan pemilihan kepala daerah secara serentak di tengah pandemi covid 19. Oleh karena itu tugas KPU di bantu oleh KPU Daerah Pemilihan dalam mensukseskan Pilkada Tahun 2020 di tengah Pandemi. Diantara daerah yang mengikuti proses pilkada di tahun 2020 adalah Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo. Oleh sebab itu, maka peran pendukung dalam meningkatkan partisipasi masyarakat ialah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango.

4.2.3.1 Peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Mayarakat pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bone Bolango di Tengah Pandemi Covid 19.

Partisipasi politik erat sekali kaitannya dengan kesadaran politik, karena semakin sadar bahwa dirinya di perintah, orang kemudian menuntut diberikan hak bersuara dalam penyelenggaraan pemerintah, Perasaan kesadaran seperti ini dimulai dari orang yang berpendidikan, yang kehidupannya lebih baik, dan orang-orang terkemuka. Dinegara-negara demokrasi umumnya dianggap bahwa lebih banyak partisipasi masyarakat lebih baik, disebabkan tingginya tingkat partisipasi menunjukan bahwa warga mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan politik. Sebaliknya tingkat partisipasi yang rendah pada umumnya dianggap sebagai tanda yang kurang baik, karena dapat ditafsirkan bahwa banyak warga tidak menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan (Budiardjo, 2008:369).

Dalam Pemilihan Kepala Daerah ditahun 2020 yang pertamakali dilakukan ditengah pandemi covid 19, pemerintah harus bersinergi dengan pihak penyelenggara pilkada dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta pihak-pihak terkait agar bisa mensukseskan pilkada di tahun 2020 walaupun dilakukan di tengah pandemi covid 19. Oleh sebab itu, pemerintah tetap mengadakan pilkada dengan tidak mengabaikan protokol kesehatan, sebagaimana diatur didalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum NO 9 Tahun 2020 dan No 10 Tahun 2020 serta No 13 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

serentak lanjutan dalam kondisi bencana nonalam corona virus disease 2019 (Covid 19). Serta di tindaklanjuti dengan peraturan 12 hal baru di dalam TPS pada pemilihan kepala daerah di tengah pandemi covid 19 tahun 2020. 12 hal baru tersebut antara lain sebagai berikut : (1) Pembatasan pemilih, (2) Pengaturan kedatangan, (3) Penggunaan masker, (4) Penggunaan sarung tangan, (5) Pengecekan suhu tubuh, (6) Mencuci tangan, (7) Dilarang bersamaan, (8) Jaga jarak, (9) Tinta tetes, (10) Penyemprotan disinfektan, (11) Menjamin KPPS sehat, dan (12) Petugas bebas covid 19. Dengan adanya peraturan tersebut maka bisa menekan wabah covid 19 di daerah yang melakukan pemilihan kepala daerah secara serentak di tahun 2020.

Untuk itu dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat perlu dilibatkannya KPU Kabupaten Bone Bolango dan partai politik serta masyarakat. Ketiga elemen tersebut harus saling bersinergi agar dapat menciptakan kenyamanan dalam proses berpolitik sehingga hasil dari partisipasi politik masyarakat bisa sesuai yang ditargetkan oleh KPU Kabupaten Bone Bolango. Selain untuk bisa meningkatkan partisipasi politik masyarakat, pihak penyelenggara pemilihan kepala daerah harus memperhatikan protokol kesehatan itu sendiri, dimana dengan adanya pandemi covid 19 tidak menimbulkan klaster baru. Sehingga pemilihan calon dan wakil calon Bupati Kabupaten Bone Bolango di tahun 2020 harus tetap mematuhi protokol kesehatan.

Untuk mengetahui bagaimana tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Bone Bolango tahun 2020 ditengah pandemi

covid 19, maka penulis mengadakan wawancara bersama Komisioner KPU Bone Bolango dengan Saudara Bapak Sofyan Djama. (Wawancara 23 Desember 2020)

“Bicara tingkat partisipasi masyarakat di 2015 itu dilakukan dalam kondisi normal dengan tingkat masyarakat mencapai 87,51%. Sekarang kita melaksanakan pilkada ditengah pandemi covid 19, ada naiknya sedikit hampir 1%. Kalau ditahun 2020 ini, kita mencapai 88,46% kalau kemarin kan 87,51%”

Sesuai dengan hasil wawancara dengan informan, pemilihan calon Bupati dan Wakil Calon Bupati dalam pemilihan kepala daerah yang dilakukan ditengah pandemi covid 19 di Kabupaten Bone Bolango, tingkat partisipasi politik masyarakat cukup tinggi dibandingkan dengan pilkada sebelumnya, dimana tingkat partisipasi politik masyarakat mencapai 88,46%. Walaupun berada dalam kondisi ditengah pandemi covid 19 tidak menyulutkan aspirasi masyarakat untuk bisa berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah kabupaten Bone Bolango. Dimana animo masyarakat cukup tinggi dalam pilkada Kabupaten Bone Bolango, dilihat dari berbagai kampanye yang telah dilakukan oleh suatu pasangan calon dan Wakil calon Bupati Bone Bolango cukup ramai dengan memperhatikan protokol kesehatan itu sendiri.

Partisipasi masyarakat pada pemilihan kepala daerah bukan hanya diukur dari hasil partisipasi politiknya tetapi bagaimana proses dalam partisipasi tersebut, sejauhmana masyarakat ikut dalam partisipasi politik. Sesuai dengan pendapat Saudara Bapak Sofyan Djama narasumber Komisioner KPU Bone Bolango (Wawancara 23 Desember 2020) :

"Bicara tingakat partisipasi tidak hanya diukur dari berapa jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya, akan tetapi bicara partisipasi juga bagaimana masyarakat, salah satunya datang ke TPS, bagaimana ia harus memutus mata rantai wabah covid 19 (ini juga salah satu partisipasi masyarakat) serta bagaimana ia juga menolak politik uang (itu semua bagian dari partisipasi politik masyarakat)"

Sesuai dengan hasil wawancara diatas, maka partisipasi politik tidak hanya dilihat dari keseluruhan hasil partisipasi politik masyarakat itu sendiri, akan tetapi dilihat dari proses partisipasi politik tersebut yang didasari dengan kesadaran politik masyarakat. Adanya kesadaran politik masyarakat dalam memberikan hak suaranya serta bagaimana masyarakat sadar akan bahanya wabah covid 19 itu merupakan bagian dari partisipasi politik masyarakat. Kesadaran politik dari masyarakat juga merupakan bagian dari proses bernegara, dimana keberhargaan suaranya sangatlah penting dari sistem yang menganut demokrasi. Kesadaran politik masyarakat lahir dari pendidikan politik yang di sosialisasikan oleh KPUD ataupun dari partai politik.

Pendidikan politik merupakan proses politik yang dilakukan untuk mencapai tingkat partisipasi yang tinggi agar kualitas demokrasi bisa sejalan dengan kuantitas partisipasi politik. Maka dari itu, pihak penyelenggara pilkada dalam hal ini KPU Kabupaten Bone Bolango memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang tahapan pemilihan kepala daerah tanpa mengabaikan protokol kesehatan itu sendiri. Sesuai dengan hasil wawancara dengan pihak KPU Bone Bolango Saudara Bapak Sofyan Djama (Wawancara 23 Desember 2020) :

“Pilkada tahun ini, memang hal yang baru kita laksanakan ditengah pandemi covid 19, walaupun berbagai macam sosialisasi kita lakukan dengan berbagai macam karakter pemilih menjadi suatu hambatan. Kita selalu memberikan edukasi kepada pemilih agar patuh terhadap protokol kesehatan, itu akan menjadi suatu (masalah) ketika masyarakat tidak mematuhi protokol kesehatan dalam pelaksanaan pilkada”

Terkait dengan proses tahapan pilkada di Kabupaten Bone Bolango, Komisioner KPU Bone Bolango Saudara Bapak Sofyan Djama mengumumkan (Wawancara 23 Desember 2020) :

“Kita turun langsung ketingkat kecamatan bahkan sampai ditingkat desa untuk menyebarluaskan informasi tentang tahapan pemilihan kepala daerah. Untuk tahapan-tahapan ini secara masif kita lakukan kepada masyarakat, akan tetapi ada pembatasan ruang tempat kumpul masyarakat (tempat terbuka ataupun tertutup) selain pertemuan secara tatap muka kita juga melakukan live streaming”

Dalam pelaksanaan tahapan pilkada yang dilakukan ditengah pandemi covid 19, ada beberapa kendala ataupun hambatan yang di alami pihak penyelenggara pilkada, menurut komisioner KPU Bone Bolango Saudara Bapak Sofyan Djama mengumumkan (Wawancara 23 Desember 2020) :

“Hambatan untuk pelaksanaa tahapan pilkada ditengah pandemi covid, memang agak sulit. Sulitnya adalah kita tidak lagi bisa mengumpulkan banyak orang, yang biasanya kita mengumpulkan di suatu tempat seratus orang sekarang dengan kondisi ditengah pandemi hanya dua puluh orang”

Dengan kendala yang dialami oleh pihak KPU Bone Bone Bolango, maka strategi yang digunakan dalam menyampaikan informasi tentang tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah, menurut komisioner KPU Bone Bolango Saudara Sofyan Djama (Wawancara 23 Desember 2020) :

“Kita punya satu aplikasi secara otomatis semua tahapan mengenai pilkada melalui WA, jadi kita klik saja hai tampil secara otomatis semua tahapan, jadi kita bisa pilih point A-Z, macam-macam tahapan. Jadi dengan hanya 20 orang, strategi itu yang kita lakukan agar informasi ini tersebarluaskan. Jika tidak memakai strategi itu, mana mungkin kami bisa mencapai (tingkat partisipasi masyarakat) 88,46%. Dengan strategi itu, kita terus lakukan juga dengan MOLAHULI. (Molahuli itu ialah momen obrolan ikhwal pemilih) itu kita lakukan melalui live streaming tentang tahapan pelaksanaan pilkada”

Sesuai dengan hasil wawancara diatas, maka pendekatan yang dilakukan oleh pihak KPU Bone Bolango kepada masyarakat untuk menyampaikan proses tahapan pemilihan kepala daerah melalui media massa elektronik. Diera modern seperti sekarang ini, media elektronik sangat membantu manusia untuk menyebarluaskan informasi. Dengan pemanfaatan media elektronik ditengah pandemi covid 19, bisa mengurangi kerumunan. Sesuai dengan wawancara Saudara Bapak Sofyan Djama (Wawancara 23 Desember 2020) dari komisioner KPU Bone Bolango :

“Selain itu, kita lakukan lewat media sosial yaitu media online, selain itu juga ada media cetak (koran) dan radio, serta kita lakukan live streaming lewat akun resmi kpu”

Dalam pilkada Kabupaten Bone Bolango, memungkin semua individu untuk berperan aktif dalam ruang publik, sehingga pilkada tidak hanya diikuti oleh golongan kaum tua saja, tetapi para kaum muda yang sudah menginjak 17 tahun. Dalam katgori politik kaum reja dimasukan dalam pemilih pemula. Mereka adalah kelompok orang yang baru pertamakali menggunakan hak pilihnya dalam pesta demokrasi. Dalam hak pilih itu, kaum tremaja memiliki kesempatan yang sama terhadap orang dewasa.

Untuk mengetahui bagaimana pihak kpu untuk bisa menarik para pemilih pemula agar ikut berpartisipasi ataupun untuk ikut memilih di TPS, maka penulis melakukan wawancara dengan Saudara Bapak Sofyan Djama (Wawancara 23 Desember 2020) Komisioner KPU Bone Bolango menyebutkan :

“Pemilih pemula ini selain kita datangi langsung di tiap desa, kita datangi juga ke sekolah. Kita data pemilih yang berumur 17 tahun dan yang akan berumur 17 tahun. Pemilih pemula ini kita fasilitasi langsung ke dinas kependudukanuntuk di data langsung”

Sesuai dengan hasil wawancara dengan informan, bahwa pemilih pemula difasilitasi langsung untuk dapat menggunakan hak pilihnya pada pilkada serentak 2020. Seperti pemilih pemula, mereka tidak memiliki pengalaman, bukan berarti memiliki keterbatasan dalam menyalurkan aspirasi politik. Bagi pemilih pemula ini merupakan kesempatan untuk dapat mengikuti pemilihan pilkada Kabupaten Bone Bolango, tentunya sangat berarti karena ini akan menjadi pengalaman pertama dan akan menjadi pelajaran bagi pemilih pemula di Kabupaten Bone Bolango serta menjadikan pengalaman bagi pemilih pemula dalam mengikuti proses politik pada pilkada di kemudian hari.

Selain para pemilih pemula yang ikut dalam pesta demokrasi terdapat juga kaum disabilitas yang berhak menyalurkan aspirasinya lewat pemilu ataupun pilkada. Kaum disabilitas ini juga diberikan hak istimewa ketika dia ikut berpartisipasi. Sesuai dengan hasil wawancara dengan komisioner KPU Bone Bolango Saudara Bapak Sofyan Djama tentang partisipasi kaum disabilitas :

“Teman-teeman PPK dan PPS datangi langsung kerumahnya untuk bisa memberikan informasi, ketika pemilih difabel datang ke TPS langsung di layani.

Begitu juga dengan orang yang sakit, kita datangi langsung kerumahnya dengan persetujuan teman-teman saksi dan panwas. Jadi tidak ada proses terlalu panjang ketika mereka ingin memberikan suaranya dan mereka langsung dilayani”

Dengan hasil partisipasi politik masyarakat yang cukup tinggi, ada sebagian masyarakat yang tidak menyalurkan aspirasinya. Mereka ini debut dengan kaum golongan putih atau Golput. Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi mereka tidak menyalurkan aspirasinya, faktor yang terpenting ialah pekerjaan. Dari hasil wawancara dengan Saudara Bapak Sofyan Djama Komisioner KPU Bone Bolango tentang Golput : “Yang tidak menggunakan hak pilihnya itu hampir 12%, ada tiga jenis pemilih yaitu DPT, Dpph serta Dptb yang melatarbelakangi masyarakat tidak memilih bukn karena golput karena ada beberapa orang yang keluar daerah pada saat hari H (pemungutan suara). Yang kedua adalah pemilih yang ada dilapas ataupun rumah sakit, serta ada juga pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya”

Dari hasil wawancara dengan Saudara Bapak Sofyan Djama, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa kaum golongan putih ataau golput yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Bone Bolango dilatarbelakangi oleh pekerjaan, bukan karena mereka tidak ikut memilih tetapi pekerjaan mereka anggap penting, tetapi ada sebagian kecil masyarakat juga yang tidak memberikan hak suaranya dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Bone Bolango tahun 2020.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dengan judul Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bone Bolango di Tengah Pandemi Covid 19 (Studi Masyarakat Pemilih di Kecamatan Bulango Selatan) yang telah di uraikan, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Perilaku pemilih dalam partisipasi politik pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Bone Bolango tahun 2020 di Kecamatan Bulango Selatan Penulis menemukan bahwa untuk mengetahui perilaku pemilih yang ada di masyarakat Kecamatan Bulango Selatan pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2020 maka penulis mengambil 2 sudut pandang mengenai perilaku pemilih yaitu :

Pertama, masyarakat di kecamatan Bulango Selatan melihat pasangan calon dan wakil calon kepala daerah banyak di pengaruhi dari asal daerah pasangan calon.

Kedua, masyarakat melihat pilkada sebagai hal yang menguntungkan bagi dirinya sendiri dengan melihat Visi-Misi pasangan calon dan wakil calon kepala daerah sebab memiliki emosional dengan salah satu partai yang

ikut dalam kontestasi pemilihan kepala daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2020.

2. Faktor pendukung dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Bulango Selatan dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Bone Bolango yang dilakukan secara serentak di Indonesia tahun 2020. Penulis menemukan bahwa untuk mengetahui faktor pendukung dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Bone Bolango maka penulis mengambil satu sudut sudut pandang sebagai berikut :

Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik rakyat masyarakat dibutuhkan penyelenggara pemilihan umum yang profesional serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas. Dalam hal ini, di perlukan suatu lembaga yang mampu mendukung pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang mampu berkompeten, lembaga tersebut ialah Komisi Pemilihan Umum. Dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Bone Bolango dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat diperlukan faktor pendukung partisipasi politik yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone Bolango. Peran Kpu Kabupaten Bone Bolango dalam pilkada serentak tahun 2020 sangat membantu masyarakat dalam menyalurkan aspirasi politiknya dalam kontestasi pilkada. Selain itu juga, sosialisasi tahapan pilkada yang dilakukan oleh Kpu Kabupaten Bone Bolango baik dalam tatap muka ataupun lewat media dalam rangka

menyampaikan informasi terkait pilkada sudah sangat baik dilakukan sehingga informasi terkait pilkada dapat diterima langsung oleh masyarakat baik dalam tatap muka ataupun lewat media seperti media cetak, media online dan media sosial..

5.2 Saran

Hasil kesimpulan pada penelitian tentang Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bone Bolango di Tengah Pandemi Covid 19 (Studi Masyarakat Pemilih di Kecamatan Bulango Selatan), maka penulis mengemukakan saran sebagai bahan pertimbangan bagi pihak penyelenggara pemilihan kepala daerah Kabupaten Bone Bolango yakni Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bone Bolango dan partai politik serta masyarakat yaitu :

1. KPU Kabupaten Bone Bolango, di harapkan agar di bentuknya relawan demokrasi bagi pemuda untuk bisa membantu pekerjaan KPU Kabupaten Bone Bolango di tingkat desa. Selain itu, melibatkan pemuda dalam relawan demokrasi untuk pilkada sangat baik dilakukan karena pemuda adalah tongkat estapet pemegang kekuasaan nantinya.
2. Partai Politik, di harapkan agar para kader partai politik tidak hanya mensosialisasikan para calonnya dalam kontestasi pilkada Kabupaten Bone Bolango tetapi juga mensosialisasikan peran partai dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat serta membantu pihak penyelenggara pilkada Kabupaten Bone Bolango dalam menyampaikan

informasi mengenai 12 hal baru di TPS agar bisa menekan wabah covid 19 ditengah masyarakat.

3. Masyarakat umum, diharapkan bisa menerapkan peraturan KPU tentang 12 hal baru diluar TPS, bukan hanya didalam TPS patuh terhadap protokol kesehatan tetapi di luar TPS, masyarakat juga tidak mengabaikan protokol kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar. 2011. *Undang-undang Nomor 32 dan 33 Tahun 2004 tentang OTODA 2004-2011*. Bandung : Citra umbara
- Andriadi. 2017. *Partisipasi Politik Virtual Demokrasi Netizen di Indonesia*. Jakarta Selatan : PT.Semesta Rakyat Merdeka.
- Anwar. *Kamus lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya : Amelia Surabaya
- Budiardjo. 2008. *Dasar-dasar ilmu politik*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Mujani, dkk. 2011. *Kuasa rakyat*. Jakarta Selatan : Mizan Media Utama
- Muslim. 2018. *Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pilkada serentak Gelombang ketiga 2018*. Jakarta : Indocamp.
- Riduwan. 2018. *Metode dan teknik menyusun tesis*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Akbar. 2016. Pilkada serentak dan geliat dinamika politik dan pemerintahan lokal. Jurnal ilmu pemerintahan. Vol 2 NO. 1 April 2016 : 97-99.
- Ferdian. 2019. Periaku memilih masyarakat, malpraktik pemilu dan pelanggaran pemilu. Jurnal ilmu pengetahuan sosial. Vol 6 No 1 Januari-Juni 2019 : 20-28.
- Hanafi. 2014. Pemilihan langsung kepala daerah di Indonesia : Beberapa catatan kritis untuk partai politik. Jurnal penelitian politik. 25 Oktober 2014 : 1-2.

Prayudi. 2020. Antisipasi implikasi pilkada serentak tahun 2020. Jurnal bidang politik dalam negeri. Vol XII No 12/II/puslit Juni 2020 : 25-26

KPU. 2020. Berita acara dan sertifikat hasil perhitungan suara setiap kecamatan di tingkat Kabupaten/kota dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020. Bone Bolango : KPU Kabupaten Bone Bolango.

Bone Bolango: (<http://bonebolangokab.go.id/> di akses 30 Januari 2021)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Pribadi :

1. Nama : Iskandar N. Yantu
2. Tempat/tanggal lahir : Gorontalo, 23 Desember 1997
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Alamat : Desa Huntu Barat Kecamatan Bulango Selatan

B. Riwayat Pendidikan :

1. SDN Huntu Utara Kecamatan Tapa Tahun 2004 – 2010
2. SMP N 12 Gorontalo Tahun 2010 – 2013
3. SMA N 4 Gorontalo Tahun 2013 – 2016
4. Universitas Ichsan Gorontalo Tahun 2017 – Sekarang

C Anggota Keluarga :

1. Nama Ayah : Niman B. Yantu
2. Nama Ibu : Yusran D. Radjak
3. Nama Adik : Nabila Saskia N. Yantu
4. Nama Adik : Naila Safira N . Yantu

DAFTAR PERTANYAAN

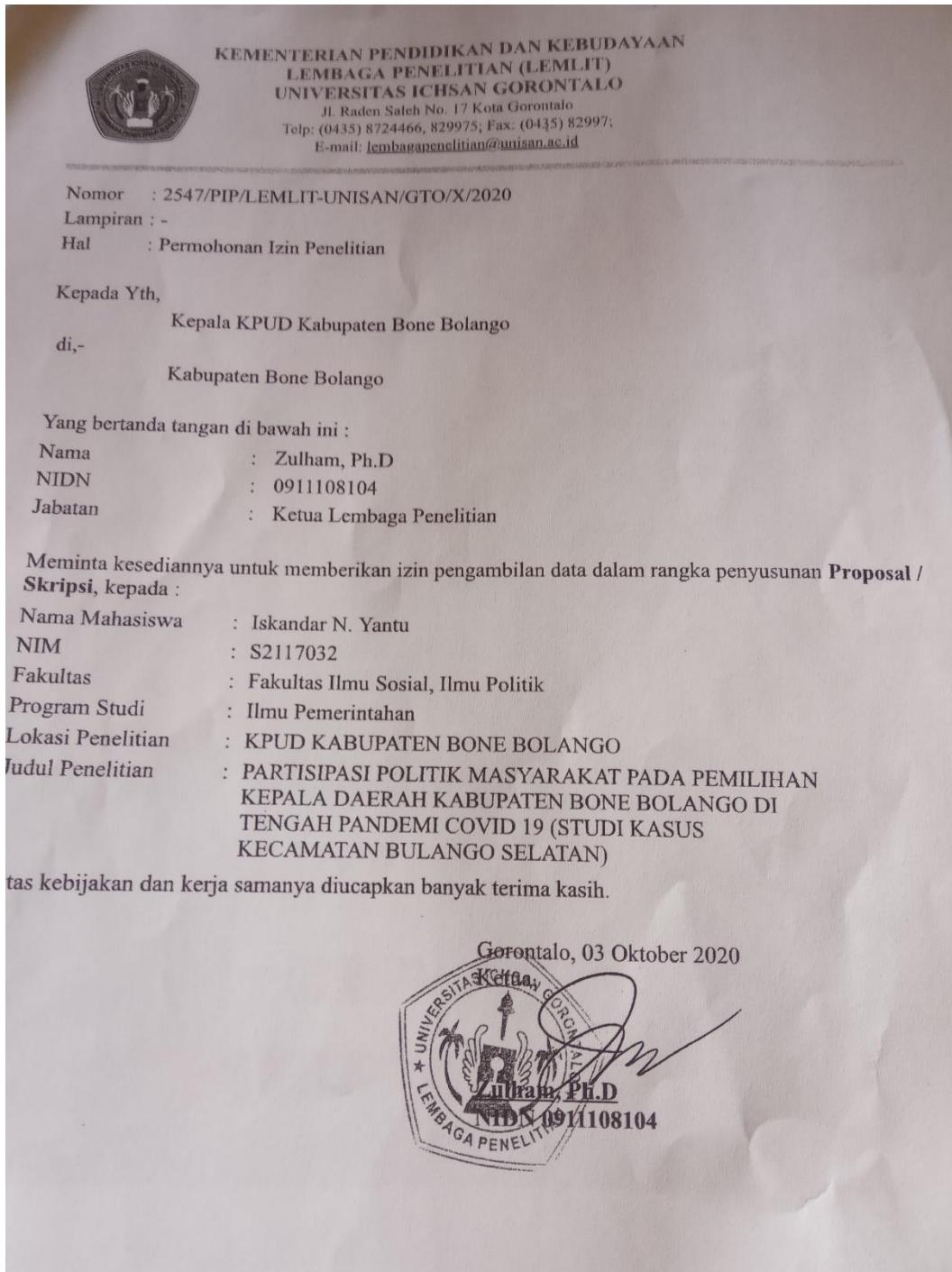
Rumusan Masalah 1 :

- Apakah anda menggunakan hal pilih sewaktu pilkada Kabupaten Bone Bolango ?
- Apa yang membuat anda ikut memilih sewaktu pilkada yang lalu ?
- Apakah dengan ikut memilih pasangan calon kepala daerah dapat berpengaruh pada pekerjaan anda ?
- Hal apa yang mendasari anda untuk mencoblos salah satu pasangan calon dalam pilkada yang lalu ?
- Apakah anda termasuk dalam tim sukses salah satu pasangan calon kepala daerah pada pilkada yang lalu ?
- Apakah anda terlibat dalam terlibat dalam kampanye salah satu pasangan calon kepala daerah ?
- Apakah anda mempunyai hubungan emosional dengan salah satu partai yang ikut dalam kontestasi pilkada kemarin ?
- Apakah dengan ikut memilih salah satu pasangan calon tertentu dapat menguntungakan diri anda ?

Rumusan Masalah 2 :

- Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam pilkada serentak Kabupaten Bone Bolango di tengah pandemi covid 19 dibandingkan dengan pilkada sebelumnya ?
- Bagaimana peran KPU dalam mensosialisasikan tahapan-tahapan pilkada serentak berhubungan dengan protokol kesehatan ?
- Apa saja hambatan yang di hadapi dalam pelaksanaan tersebut ?
- Apakah partisipasi politik masyarakat hanya dilihat dari hasil pilkada ?
- Bagaimana tanggapan KPU terhadap Golput ?
- Bagaimana strategi KPU dalam menarik pemilih pemula untuk menggunakan hak pilihnya ?
- Bagaimana peran KPU dalam menyampaikan informasi pilkada terhadap kaum disabilitas ?

Surat Penelitian di KPU Kab. Bone Bolango



Surat Balasan dari KPU Kab. Bone Bolango

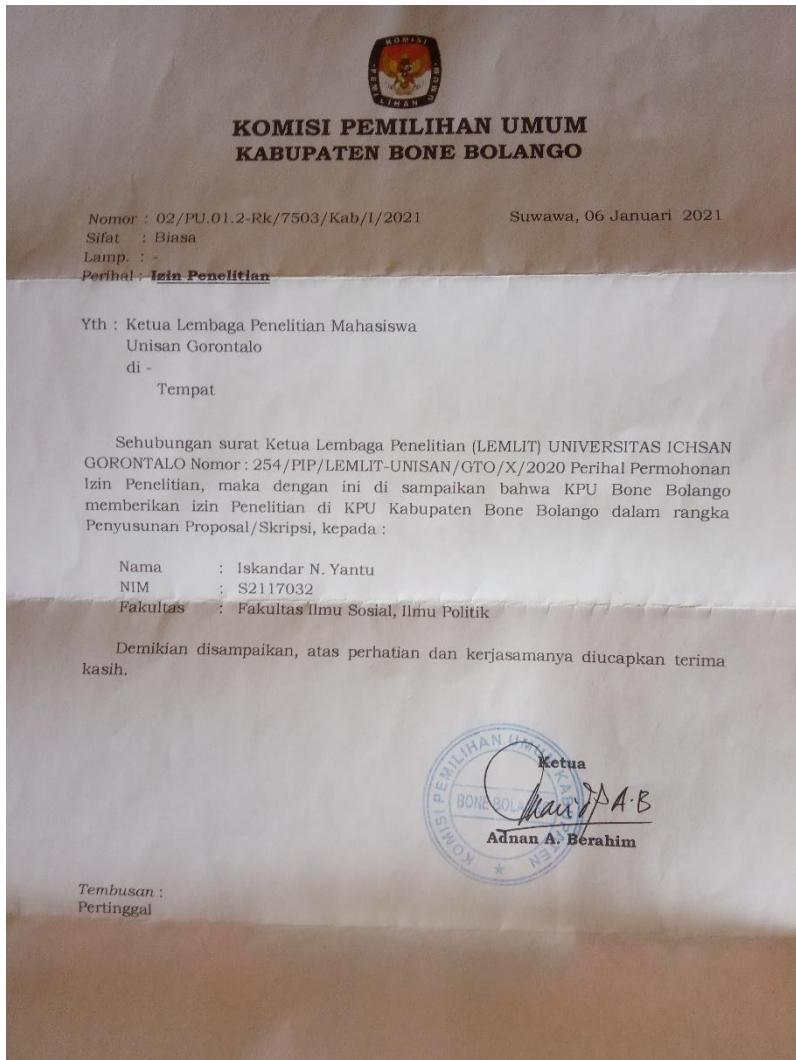


Foto wawancara dengan masyarakat



Foto Wawancara dengan Komisioner KPU



Foto di KPU Kab. Bone Bolango



ABSTRACT

ISKANDAR N. YANTU. S2117032. THE COMMUNITY POLITICAL PARTICIPATION IN THE BONE BOLANGO REGIONAL ELECTION AMIDST THE COVID-19 PANDEMIC (A STUDY ON VOTERS COMMUNITY IN SOUTH BULANGO SUBDISTRICT)

This study aims to examine the voting behavior of the South Bulango sub-district community and the role of supporting factors in the increase of community political participation in the Bone Bolango regional election amidst the COVID-19 pandemic. The method applied in this study is a descriptive qualitative approach where the informants being the mandatory voters aged 17 years and over. The number of informants is adjusted to the data needed either primary or secondary data comprising of Human Resources Commissioner of Bone Bolango General Election Commission (KPU Bone Bolango) and the community of South Bulango sub-district. The technique of data collection uses observation, interviews, and documentation. The data analysis consists of three parts which are data reduction, data display, and conclusion drawing. The results of the study indicate that the community political participation in the Bone Bolango regional election amidst the COVID-19 pandemic in the South Bulango sub-district can be classified as good. It can be examined from the information provided by the Commissioner of KPU Bone Bolango that community participation in the Bone Bolango regional election is quite high compared to that of Pohuwato and Gorontalo district. The community's voting behavior is the most significant factor since it is a part of community political participation. The voting behavior of the South Bulango district community in the 2020 Bone Bolango regional election is highly influenced by the candidates' place of origin and is in accordance with what the community reports. Apart from the place of origin, the community also notices the vision and mission conveyed by the pairing candidates of district head and vice-district head in Bone Bolango regional election in order to obtain information and to determine their choice

Keywords: community, political participation, regional election, voters' behavior



ABSTRAK

ISKANDAR N. YANTU. S2117032. PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO DI TENGAH PANDEMI COVID 19 (STUDI MASYARAKAT PEMILIH DI KECAMATAN BULANGO SELATAN).

Penelitian ini bertujuan yaitu untuk mengetahui perilaku pemilih masyarakat di kecamatan Bulango Selatan serta bagaimana peran faktor pendukung dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam pilkada Kabupaten Bone Bolango ditengah pandemi covid 19. Metode yang digunakan di dalam penelitian ini melalui pendekatan kualitatif dengan penyajian secara deskriptif, dimana informan dalam penelitian ini adalah masyarakat wajib pilih yang sudah berumur 17 tahun keatas. Jumlah informan di sesuaikan dengan kebutuhan data, baik data primer ataupun sekunder yang terdiri dari Komisioner KPU Kabupaten Bone Bolango bidang Sumber Daya Manusia (SDM) serta masyarakat di Kecamatan Bulango Selatan. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data terbagi atas 3 bagian yaitu data reduksi, penyajian data (data display) dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pilkada Kabupaten Bone Bolango di Tengah Pandemi Covid 19 di Kecamatan Bulango Selatan, sudah dapat dikatakan baik. Hal ini dapat di ketahui dari informasi yang di berikan oleh Komisioner KPU Kabupaten Bone Bolango bahwa partisipasi masyarakat dalam pilkada Kabupaten Bone Bolango terbilang cukup tinggi dibandingkan dengan tingkat partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Gorontalo. Perilaku pemilih yang ada di tengah masyarakat menjadi faktor yang paling penting, di mana perilaku pemilih merupakan salah satu bagian dari partisipasi politik masyarakat. Perilaku pemilih yang ada masyarakat di Kecamatan Bulango Selatan dalam Pilkada Kabupaten Bone Bolango banyak pengaruh oleh faktor daerah asal calon dalam pilkada di tahun 2020 hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh masyarakat. Selain faktor daerah asal calon, masyarakat melihat visi-misi yang disampaikan oleh pasangan calon Bupati dan wakil Bupati dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bone Bolango untuk bisa memperoleh informasi serta menetapkan pilihan masyarakat terhadap pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango.

Kata kunci : masyarakat, partisipasi politik, pilkada, perilaku pemilih





Iskandar Yantu S2117032 Partisipasi Politik Masyarakat.docx

Feb 10, 2021

15988 words / 103244 characters

S2117032

Skripsi_Iskandar Yantu S2117032 Partisipasi Politik Masyarakat...

Sources Overview

27%

OVERALL SIMILARITY

1	weinarifin.wordpress.com INTERNET	2%
2	www.bonebolangokab.go.id INTERNET	2%
3	bonebolangokab.go.id INTERNET	1%
4	id.wikipedia.org INTERNET	1%
5	digilib.unila.ac.id INTERNET	1%
6	media.neliti.com INTERNET	1%
7	www.coursehero.com INTERNET	1%
8	news.detik.com INTERNET	1%
9	adwintaactivity.blogspot.com INTERNET	<1%
10	repository.uinjkt.ac.id INTERNET	<1%
11	repository.unair.ac.id INTERNET	<1%
12	bundanyacinta.wordpress.com INTERNET	<1%
13	journal.uta45jakarta.ac.id INTERNET	<1%
14	repository.ar-raniry.ac.id INTERNET	<1%
15	jdih.kpu.go.id INTERNET	<1%
16	jurnal.um-tapsel.ac.id INTERNET	<1%

17	digilib.uin-suka.ac.id INTERNET	<1%
18	fundra-dian.blogspot.com INTERNET	<1%
19	scholar.unand.ac.id INTERNET	<1%
20	adoc.site INTERNET	<1%
21	berkas.dpr.go.id INTERNET	<1%
22	repository.unej.ac.id INTERNET	<1%
23	eprints.undip.ac.id INTERNET	<1%
24	id.123dok.com INTERNET	<1%
25	kekegpw.blogspot.com INTERNET	<1%
26	ejurnal.politik.lipi.go.id INTERNET	<1%
27	es.scribd.com INTERNET	<1%
28	Resista Vikaliana, I Nyoman Purnaya. "Optimalisasi Distribusi Surat Suara Pemilu pada Pemilihan Umum Serentak 2019", Transparansi... CROSSREF	<1%
29	bayupradana.blogspot.com INTERNET	<1%
30	rudyirawanmaster.blogspot.com INTERNET	<1%
31	docobook.com INTERNET	<1%
32	studylibid.com INTERNET	<1%
33	iqbalmunimed.files.wordpress.com INTERNET	<1%
34	www.oanlianmalaka.com INTERNET	<1%
35	repository.uinsu.ac.id INTERNET	<1%
36	ejurnal.unsrat.ac.id INTERNET	<1%
37	repository.usu.ac.id INTERNET	<1%
38	www.gorontaloprov.go.id INTERNET	<1%
39	jurnalmahasiswa.unesa.ac.id INTERNET	<1%
40	kab-banyuwangi.kpu.go.id INTERNET	<1%

41	LL Dikti IX Turnitin Consortium on 2019-07-19 SUBMITTED WORKS	<1%
42	eprints.ums.ac.id INTERNET	<1%
43	partainasdembk.wordpress.com INTERNET	<1%
44	journal.unpad.ac.id INTERNET	<1%
45	kpu-salatiga.go.id INTERNET	<1%
46	lib.unnes.ac.id INTERNET	<1%
47	kab-maros.kpu.go.id INTERNET	<1%
48	repositori.uin-alauddin.ac.id INTERNET	<1%
49	e-journal.hamzanwadi.ac.id INTERNET	<1%
50	id.scribd.com INTERNET	<1%
51	nurmalitadias.blogspot.com INTERNET	<1%
52	unhas.ac.id INTERNET	<1%

Excluded search repositories:

- None

Excluded from Similarity Report:

- Bibliography
- Quotes
- Small Matches (less than 20 words).

Excluded sources:

- None



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN
(UNISAN) GORONTALO

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001
Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 0009/UNISAN-G/S-BP/II/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN : 0906058301
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasiswa : ISKANDAR N. YANTU
NIM : S2117032
Program Studi : Ilmu Pemerintahan (S1)
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Judul Skripsi : Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bone Bolango di tengah pandemi covid 19

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 27%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujangkan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 11 Februari 2021
Tim Verifikasi,



Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip

BIODATA MAHASISWA

Nama	: Iskandar N. Yantu
NIM	: S2117072
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Tempat Tanggal lahir : Gorontalo, 23 Desember 1997	
Agama	: Islam
Suku Bangsa	: Indonesia
Alamat	: Jl. Khalid Hasiru Kab. Bone Bolango
Fakultas	: Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (FISIP)
Program Studi	: Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan	: S1 (Strata Satu)
Judul Skripsi	: Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bone Bolango Ditengah Pandemi Covid-19 (Studi Masyarakat Dikecamatan Bulango Selatan)

